

BUMI PURA

CITA CITRA GERBANG NEGARA



Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Imigrasi

Edisi 04

Volume 12/Agustus 2025
www.imigrasi.go.id/majalah
Majalah Media Keimigrasian



IMIGRASI BERDAULAT, INDONESIA BERMARTABAT

Era baru Imigrasi ditandai dengan integrasi kamera tubuh dan sistem canggih sehingga setiap langkah dalam mengawal kedaulatan negara dapat dipertanggungjawabkan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas dapat diwujudkan.



Layanan Paspor



Syarat

1. Kartu tanda penduduk (KTP)
2. Kartu keluarga (KK)
3. Akta kelahiran/akta perkawinan/buku nikah/ijazah/surat baptis

Biaya

Pelayanan percepatan paspor	Rp1.000.000
Paspor nonelektronik masa berlaku 5 tahun	Rp350.000
Paspor nonelektronik masa berlaku 10 tahun	Rp650.000
Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun	Rp650.000
Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun	Rp950.000

Prosedur

1. Datang langsung ke kantor imigrasi tanpa melalui aplikasi M-Paspor maksimal pukul 10 pagi.
2. Isi formulir permohonan paspor serta lampirkan dokumen persyaratan.
3. Serahkan berkas permohonan paspor untuk diperiksa oleh petugas imigrasi.
4. Tunggu berkas permohonan diinput oleh petugas imigrasi.
5. Ikuti proses foto dan wawancara.
6. Lakukan pembayaran di bank.
7. Dapatkan paspor yang telah diterbitkan.

Silakan **hubungi kantor imigrasi** terdekat untuk informasi lebih lanjut



MENYEMAI INTEGRITAS DALAM MENGAWAL BANGSA

Halo, Sahabat Mido!

Dengan bangga, kami mempersembahkan majalah *BhumiPura* edisi keempat yang hadir membawa semangat baru. Di tengah dinamika global, peran Imigrasi kian strategis, tidak hanya sebagai penjaga pintu gerbang negara, tetapi juga pilar kedaulatan yang berinteraksi langsung dengan wajah peradaban dunia.

Pada *Laporan Utama*, kami mengulas tema besar “Imigrasi Bermartabat, Indonesia Berdaulat”. Artikel ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana setiap langkah Imigrasi—mulai dari pelayanan publik hingga penegakan hukum—dilakukan dengan menjunjung tinggi martabat bangsa.

Edisi ini juga mengangkat *Liputan Khusus* yang menyentuh hati, yaitu kisah sukses Desa Binaan Imigrasi di Sumbawa dan Sampit.

Perhatian kami juga tertuang dalam artikel tentang kebijakan visa pendidikan bagi warga negara asing (WNA) dan peninjauan ulang paspor desain merah putih pada rubrik *Kebijakan*. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya adaptif Imigrasi dalam menyikapi kebutuhan mobilitas global sekaligus memperkuat identitas nasional.

Pada rubrik *Kerja Kita*, pembaca dapat menyimak berbagai kasus, mulai dari deportasi dua WNA asal Spanyol hingga penyelundupan manusia oleh sindikat di Mataram. Lalu, Sahabat Mido akan menemukan informasi lengkap tentang deklarasi kedatangan yang kini terintegrasi dalam aplikasi All Indonesia pada rubrik *InformaTips*. Kami juga membagikan tip penting untuk mengenali dan menghindari penipuan daring yang makin marak.

Melengkapi wacana, artikel “Bekerja dalam Konteks Keimigrasian” dan “Kecerdasan Buatan dan Kompas Moral Bangsa” dalam rubrik *Opini* dan *Pojokomunikasi* mengajak kita berpikir lebih dalam tentang tantangan dan etika pada era digital.

Terakhir, pada rubrik *Renjana*, kami menghadirkan refleksi tentang hubungan manusia dan kecerdasan buatan serta gerakan berkebayu di Indonesia. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa di balik kemajuan teknologi, nilai-nilai kemanusiaan dan tradisi harus tetap menjadi kompas utama.

Semoga artikel-artikel pada edisi ini dapat memperkaya wawasan dan menumbuhkan rasa bangga kita semua terhadap Imigrasi sebagai garda terdepan kedaulatan bangsa. Selamat membaca, Sahabat Mido!



cerita sampul

Dengan semangat “Imigrasi Berdaulat, Indonesia Bermartabat”, Imigrasi menjalankan peran strategisnya dalam menjaga kedaulatan negara sembari terus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan martabat bangsa.

PENGARAH

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

PEMIMPIN UMUM

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik

PEMIMPIN REDAKSI

Yolanda Rosylvia Juniar

ANGGOTA REDAKSI

Ajeng Dhyanti Paramitha, Ajeng Rahma Safitri, Arif Rahman Suryaman, Dimas Zainuddin Sukmajatnika, Eka Safitri, Elyan Nadian Zahara, Fipit Fatimah, Habil Ashari, Irnadika Natasia Tiominar, Mayza Fairda, Riski Amalia, Rr. Aditya Citraningtyas Ningrum, Yanos Okterano

PENYUNTING BAHASA

Tim Narabahasa

ILUSTRATOR SAMPUL

Gepzki

PENATA LETAK & DESAIN

Tim Narabahasa

PERCETAKAN

Tim Narabahasa

SIRKULASI

Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Imigrasi

ALAMAT REDAKSI

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. X-6, No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan

KONTAK REDAKSI

imigrasibhumpura@gmail.com

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan/ artikel yang dimuat akan mendapatkan honor sesuai standar yang berlaku.

DARI REDAKSI

3. Menyemai Integritas dalam Mengawal Bangsa

LAPORAN UTAMA

8. Imigrasi Bermartabat, Indonesia Berdaulat

LIPUTAN KHUSUS

12. Semangat Imigrasi Melayani di Pulau Sumbawa

14. Desa Binaan Imigrasi: Pelindungan dan Akses Layanan Merambah Pelosok Negeri

KEBIJAKAN

16. Indonesia Resmi Merilis Visa Pendidikan Nonformal untuk WNA

17. Paspur Desain Merah Putih Ditinjau Ulang, Imigrasi Fokus Memperkuat Pelayanan

KERJA KITA

18. Masuk Indonesia secara Ilegal, Dua WN Spanyol Dideportasi

19. Belajar Bahasa Asing di Perpustakaan Ditjen Imigrasi

20. 8 Warga Negara Uzbekistan Diamankan di Perbatasan RI-RDTL

22. Lecehkan Masyarakat Adat Asmat demi Konten, WN Tiongkok Diamankan

23. Diduga Terlibat Sindikat Penyelundupan Manusia, 16 WN Bangladesh Diamankan Imigrasi Mataram

24. Jaga Stabilitas dan Keamanan Wilayah, Satgas Patroli Imigrasi Dikukuhkan

25. Menyalahgunakan Izin Tinggal, 11 WN Vietnam Disergap di Klinik Kecantikan

26. Kompilasi Gakkum

KILAS PERISTIWA

28. Cegah Perdagangan Orang, Sosialisasi Tunas Imigrasi Hadir untuk Pelajar Pati

38. Pojokomunikasi

Love Scamming: Menipu Itu Bukan Tanda Cinta



**URUS PASPOR CEPAT, SATSET,
DAN BISA SAMBIL NGE-MALL DI**

Immigration Lounge

Tersedia di **8 Mal Besar** di Indonesia

Melayani **permohonan percepatan paspor elektronik**
(permohonan baru dan penggantian paspor)

Daerah Khusus Jakarta

- **Pondok Indah Mall 3, Lantai B2**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
- **Mall Taman Angrek, Lantai LG**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
- **Senayan City, Lantai 6**
Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 08.00-14.00 WIB
- **Kebayoran Park Mall, Lantai LG**
Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 08.00-14.00 WIB

Jawa Barat

- **Grand Metropolitan Mall, Bekasi**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB
- **Pesona Square Mall Depok, Lantai 3**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB

Jawa Timur

- **Icon Mall Gresik, Kabupaten Gresik**
Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
- **Ciputra World Mall Surabaya, Lantai 4**
Senin-Kamis pukul 10.00-18.00 WIB
Jumat pukul 10.00-18.30 WIB

Biaya

- Paspor elektronik masa berlaku 5 tahun
Rp650.000
- Paspor elektronik masa berlaku 10 tahun
Rp950.000
- Percepatan paspor **Rp1.000.000**

Ajukan permohonan
dan daftar melalui

Aplikasi M-Paspor

Unduh sekarang di





- 29. IMOX 2025: Dukungan Imigrasi untuk Industri Maritim Batam
- 30. Immigration Lounge Kini Hadir di Kebayoran Park Mall
- 31. Kanim Jakpus Goes to School: Tingkatkan Literasi Keimigrasian untuk Generasi Muda

INFORMATIPS

- 32. Aplikasi All Indonesia: Deklarasi Kedatangan dalam Satu Sistem Digital
- 33. Modus Baru Penipuan Daring Mengatasnamakan Instansi Pemerintah: Bagaimana Mencegahnya?

OPINI

- 34. Bekerja dalam Konteks Keimigrasian

POJOKOMUNIKASI

- 36. Kecerdasan Buatan dan Kompas Moral Bangsa
- 38. Love Scamming: Menipu Itu Bukan Tanda Cinta

RENJANA

- 40. Ketika AI Makin Cerdas, Apakah Kita Kian Lupa Menjadi Manusia?
- 42. Melestarikan Kebaya, Merawat Jati Diri Bangsa

INFOGRAFIK

- 44. Daftar Subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK)
- 45. Level Up through Education in Indonesia

KABAR DARI SEBERANG

- 46. Forum Internasional DGICM 2025: Desa Binaan Imigrasi Jadi Inspirasi

RESENSI

- 48. Insecurity is My Middle Name: Saat Perasaan Negatif Jadi Katalis Perubahan

49. MATA LENSA 50. KOMIK



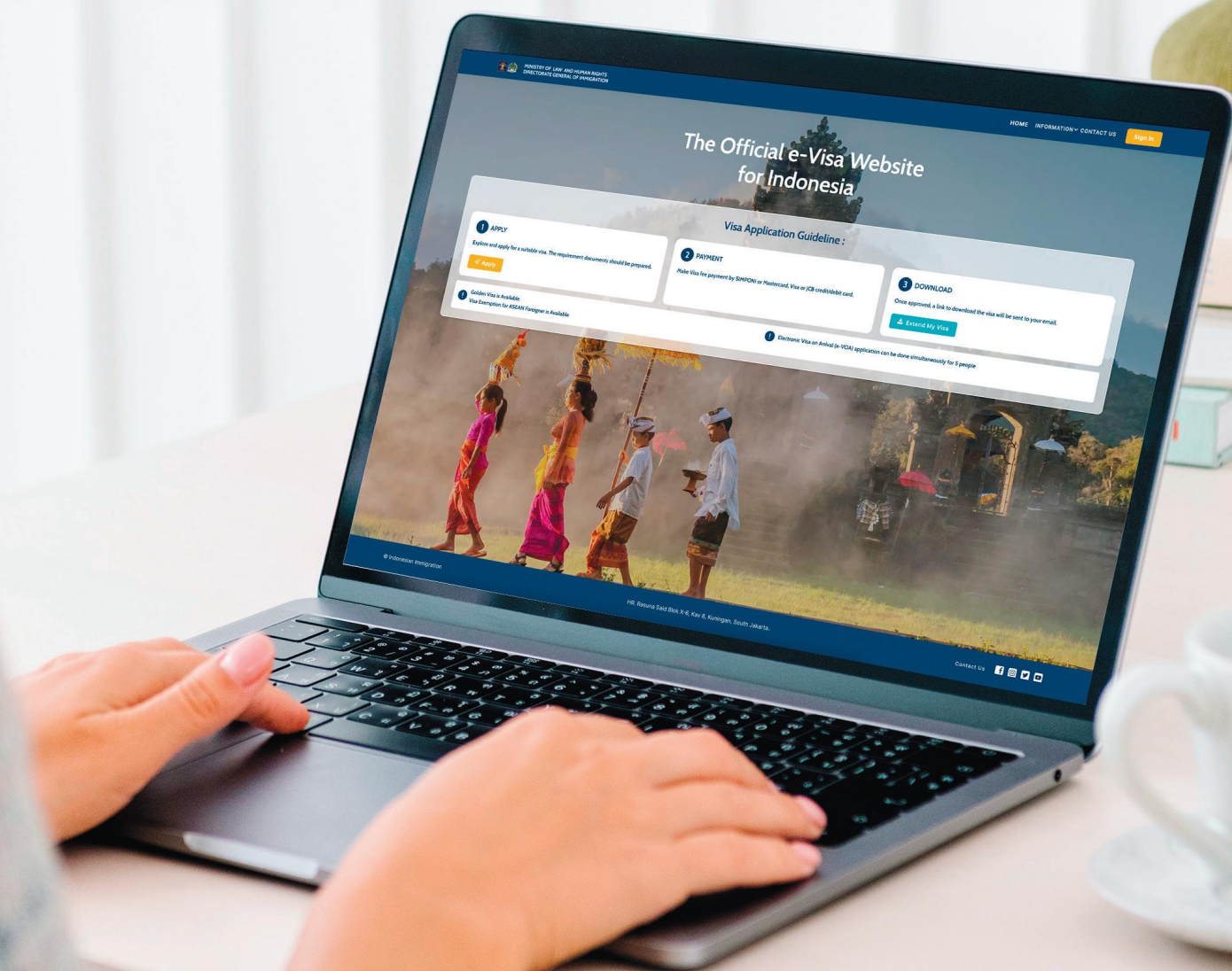
BhumiPura adalah media internal yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Majalah ini menyajikan berita dan tulisan seputar keimigrasian secara aktual, mendalam, dan informatif.

BhumiPura saat ini dapat dibaca atau diunduh melalui imigrasi.go.id/majalah.

Now, you can apply for
electronic visa on arrival (e-VOA),
visitor visa for tourism, and e-VOA extension

through **evisa.imigrasi.go.id**

Access now and experience the convenience!



IMIGRASI BERMARTABAT, INDONESIA BERDAULAT

Dengan *bodycam*, Imigrasi tidak hanya mengawal kedaulatan bangsa, tetapi juga memastikan setiap layanan tercatat secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini menjadi penanda era baru pelayanan publik yang lebih transparan dan berkualitas.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Pada era ketika mobilitas dan konektivitas menjadi nadi peradaban, gerbang suatu negara menjelma menjadi lebih dari sekadar pintu keluar-masuk. Ia adalah benteng terdepan yang menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang tak pernah terlelap, setiap detik dan interaksi menjadi sangat berarti. Di balik stempel paspor dan senyum ramah petugas, terdapat sebuah misi yang jauh lebih besar: ketelitian, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Inilah wajah baru Imigrasi Indonesia, sebuah lembaga yang bertransformasi demi menjawab tuntutan zaman akan transparansi, dengan teknologi canggih yang berfungsi sebagai mata dan telinga di garis terdepan.

“Mata” Baru Imigrasi: Simbol Kepatuhan dan Transparansi

Pada Jumat (25/7) dini hari, suasana di area imigrasi Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta terasa berbeda. Tepat pukul 01.00 WIB, ketika ibu kota masih terlelap, ratusan petugas imigrasi berkumpul dalam sebuah apel bersama. Apel ini bukan sekadar rutinitas, melainkan titik balik sejarah yang menandai dimulainya era baru pelayanan keimigrasian.

Apel yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sandi Andaryadi ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi, termasuk

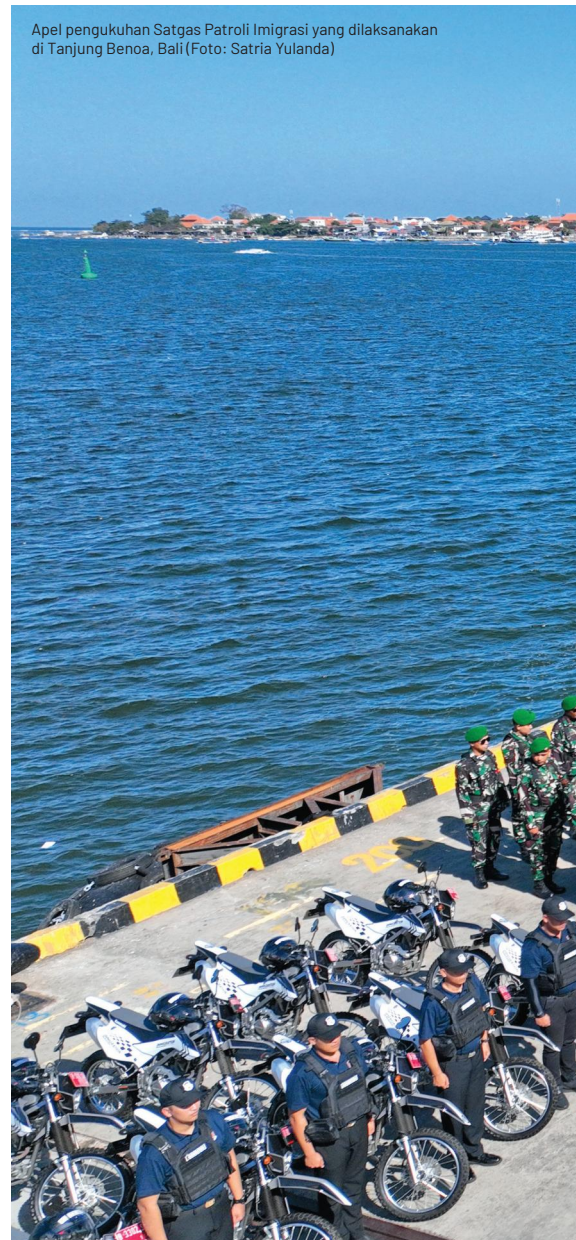
Direktur Kepatuhan Internal Baron Ichsan dan Kepala Kantor Wilayah DJP Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Pamuji Raharja. Di hadapan 436 personel imigrasi yang siap siaga, Sandi kemudian menyematkan *body camera* (*bodycam*) atau kamera tubuh kepada lima petugas secara simbolis.

Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta dalam meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme. Sandi menegaskan, “Dengan adanya *bodycam*, setiap interaksi dan tindakan petugas akan terekam, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, serta menjadi bukti objektif jika terjadi insiden. Ini juga merupakan upaya penguatan pengawasan internal demi pelayanan keimigrasian yang bersih dan profesional.”

Pernyataan itu sekaligus menjadi deklarasi kesiapan Imigrasi Soekarno-Hatta untuk bertanggung jawab dan diawasi secara transparan. Sejak Jumat (25/7) itu, sebanyak 24 personel di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dan petugas intelijen telah dilengkapi dengan *bodycam*.

Selesai apel, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh perwakilan pegawai. Momen ini makin mengukuhkan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi etika kerja, menjauhi segala bentuk penyimpangan,

Apel pengukuhan Satgas Patroli Imigrasi yang dilaksanakan di Tanjung Benoa, Bali (Foto: Satria Yulanda)



serta memberikan pelayanan publik yang berintegritas. Dalam kesempatan tersebut, Sandi Andaryadi kembali menekankan bahwa *bodycam* tidak hanya berperan sebagai alat pengawas, melainkan juga pelindung bagi petugas. Rekamannya dapat menjadi alat bukti yang kuat bahwa petugas telah bertindak sesuai dengan prosedur—sebuah bentuk perlindungan yang vital pada era yang menuntut transparansi dalam setiap aspek pelayanan.

Satgas Patroli Imigrasi: 100 Petugas Ber-*bodycam*

Setelah Imigrasi Soekarno-Hatta, kini giliran petugas imigrasi di Bali yang

dilengkapi dengan *bodycam*. Pada Selasa (5/8) lalu, sebanyak 100 orang petugas secara resmi dikukuhkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) sebagai Satuan Tugas (Satgas) Patroli Keimigrasian. Keberadaan satgas ini memiliki tiga tujuan utama: memberikan respons cepat (*quick response*) terhadap pelanggaran, menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Bali, dan menciptakan serta menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

Untuk memastikan efektivitas patroli, setiap personel dilengkapi dengan rompi pengaman dan *bodycam*. Mereka berpatroli menggunakan sepeda motor atau mobil patroli imigrasi yang disebar di 10 titik strategis dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar. Lokasi-lokasi tersebut meliputi Kuta Utara (Canggu); Seminyak, Kerobokan; Pelabuhan Matahari Terbit dan Benoa; Pecatu (Uluwatu, Bingin); Pantai Mertasari; Kecamatan Kuta dan Gianyar (Ubud);

BODYCAM TIDAK HANYA BERPERAN SEBAGAI ALAT PENGAWAS, MELAINKAN JUGA PELINDUNG BAGI PETUGAS.



Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman
(Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)



Deretan mobil Satgas Patroli Imigrasi yang siap bertugas (Foto: Tommy Ariyanto)

serta Nusa Dua, Jimbaran.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan strategi patroli tersebut. "Komandan tim (dantim) dan petugas patroli akan berpatroli pada rute yang telah ditentukan, terutama di area rawan pelanggaran keimigrasian atau daerah tempat kegiatan WNA terkonsentrasi. Jadwal pergerakan patroli dilakukan secara berkala dan acak untuk menghindari pola yang mudah ditebak," ujarnya.

Penguatan satgas ini makin memperkuat komitmen Imigrasi yang telah dibuktikan dengan capaian kinerja signifikan. Data statistik membuktikan peningkatan yang pesat: pada periode November s.d. Desember 2024, Ditjen Imigrasi mencatat 607 deportasi dan 303 detensi. Angka ini melonjak drastis pada periode Januari s.d. Juli 2025, menjadi 2.669 deportasi dan 2.009 detensi. Selain itu, sebanyak 62 orang asing telah diproses hukum dalam rentang waktu November 2024 hingga Juli 2025.

"Ke depannya, kami akan terus menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal, seperti patroli rutin satgas, maupun skala nasional, seperti Wira Waspada. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Imigrasi," ujar Yuldi.

Jejak Bodycam: Evolusi dari Amerika hingga Dunia

Penggunaan *bodycam* oleh petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta

dan Satgas Patroli Imigrasi di Bali merupakan bagian dari tren global yang telah berlangsung cukup lama. Dalam perkembangannya, *body-worn camera* atau *bodycam* kini telah berevolusi dari sekadar alat pelengkap menjadi komponen integral dalam sistem penegakan hukum modern. Sejarah alat ini bermula di Amerika Serikat pada awal 2000-an ketika sejumlah departemen kepolisian mulai mengujicobakannya. Tujuan utamanya adalah meminimalisasi penggunaan kekerasan dan menyediakan bukti visual yang objektif dalam berbagai kasus yang kontroversial.

Salah satu studi percontohan paling berpengaruh dilaksanakan di Rialto, California, pada 2012. Hasilnya mengejutkan: Implementasi *bodycam* di departemen kepolisian setempat berhasil menekan jumlah keluhan masyarakat hingga 88% dan mengurangi angka penggunaan kekerasan oleh aparat sebanyak 59%. Temuan ini lantas berperan sebagai katalisator yang mendorong adopsi *bodycam* secara lebih masif di seluruh Amerika Serikat.

Gelombang adopsi *bodycam* ini juga merambah ke Inggris Raya. Kepolisian Metropolitan London (Met Police) memelopori inisiatif ini dengan meluncurkan program percontohan yang masif, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Uji coba yang dimulai pada 2014 ini melibatkan ribuan petugas dengan tujuan ganda: meningkatkan transparansi dan memberikan perlindungan, baik bagi masyarakat maupun petugas itu sendiri. Dalam konteks ini, peran *bodycam*

menjadi sangat krusial, khususnya dalam insiden yang melibatkan kekuatan fisik karena membantu mengklarifikasi narasi dari kedua belah pihak dan mempercepat proses hukum.

Seiring waktu, penggunaan *bodycam* meluas ke berbagai lembaga penegak hukum di berbagai negara. Di Kanada, Badan Layanan Perbatasan Kanada (Canada Border Services Agency/CBSA) melakukan uji coba *bodycam* bagi petugasnya. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas

Potret Satgas Patroli Imigrasi (Foto: Fiqri Anshari)



“DENGAN ADANYA BODYCAM, SETIAP INTERAKSI DAN TINDAKAN PETUGAS AKAN TEREKAM, MEMASTIKAN KEPATUHAN TERHADAP PROSEDUR, SERTA MENJADI BUKTI OBJEKTIF JIKA TERJADI INSIDEN.”

dan melindungi petugas yang kerap menghadapi situasi sensitif di area perbatasan. Sementara itu, di Amerika Serikat, lembaga seperti U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) turut mengadopsi teknologi ini. Langkah tersebut merupakan respons terhadap tuntutan publik akan transparansi, khususnya dalam operasi imigrasi yang sering kali kontroversial. Keberadaan rekaman video memungkinkan setiap interaksi, mulai dari penangkapan hingga deportasi, untuk diawasi dan ditinjau secara lebih objektif.

Sistem Analisis Canggih: Passenger Analysis Unit

Langkah Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dalam mengadopsi *bodycam* bukanlah suatu inisiatif yang berdiri sendiri. Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda besar modernisasi yang telah lama digalakkan, yang salah satu pilarnya adalah pembentukan Passenger Analysis Unit (PAU). Unit khusus ini beroperasi di TPI dan memegang peran strategis dalam menjaga keamanan arus perlintasan orang yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia.

PAU sebagai garda terdepan dalam analisis intelijen keimigrasian beroperasi dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta informasi terkait pergerakan penumpang. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi secara *real-time* kepada petugas imigrasi guna mengidentifikasi potensi permasalahan keimigrasian di TPI.

Cara kerja unit ini memanfaatkan integrasi berbagai perangkat dan sistem canggih, mulai dari kamera pengawas (CCTV) di area pemeriksaan imigrasi yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP) hingga basis data keimigrasian nasional dan internasional. Seluruh



Penyematan *bodycam* oleh Sekretaris Ditjen Imigrasi Sandi Andaryadi kepada petugas imigrasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Foto: Putu Maha Permana)

data tersebut dianalisis secara simultan guna memverifikasi kesesuaian identitas penumpang serta mendeteksi indikasi keterkaitan dengan daftar cegat dan tangkal maupun daftar pencarian orang (DPO).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Galih Priya Kartika Perdana menjelaskan bahwa PAU berfungsi sebagai garda terdepan dalam analisis intelijen keimigrasian di bandara. “Kecepatan dan ketepatan informasi yang diberikan unit ini sangat membantu petugas di lapangan dalam mengambil langkah penegakan hukum maupun pencegahan,” tambahnya.

Sebagai contoh, PAU mampu mengidentifikasi secara cepat penumpang yang namanya tercantum dalam Red Notice Interpol atau masuk dalam daftar cegat dan tangkal. Berdasarkan informasi tersebut, petugas di TPI dapat segera menerapkan langkah pencegahan, seperti menahan keberangkatan atau menolak masuknya penumpang, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Imigrasi yang Berintegritas dan Profesional

Integrasi *bodycam* dengan sistem canggih seperti PAU merefleksikan komitmen Imigrasi Soekarno-Hatta dalam mendorong modernisasi dan profesionalisme, sekaligus menjadi

upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi petugas maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Kepatuhan Internal Baron Ichsan dalam pengarahannya yang menegaskan, “Secara keseluruhan, momentum ini menjadi bentuk komitmen jajaran pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta terhadap modernisasi, profesionalisme, dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi petugas maupun masyarakat.”

Kolaborasi antara teknologi canggih, sumber daya manusia yang berintegritas, dan sistem pengawasan yang mumpuni adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik melalui kinerja yang berkualitas. Dengan *bodycam* yang berperan sebagai “mata” yang merekam dengan objektif dan PAU sebagai “otak” yang menganalisis, Imigrasi Indonesia tidak hanya mengawal gerbang kedaulatan negara, tetapi juga menegaskan komitmennya sebagai lembaga yang responsif dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Inilah yang menandai dimulainya era baru Imigrasi—sebuah era ketika setiap langkah dan keputusan diambil dengan penuh tanggung jawab, terawasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi terwujudnya pelayanan publik yang makin berkualitas. ■

SEMANGAT IMIGRASI MELAYANI DI PULAU SUMBAWA

“Jika tak ingin mereka pergi, kita harus dukung mereka mandiri berkarya.”
— Edy Heryady

Di balik keindahan alam Sumbawa, tersimpan kisah mengagumkan tentang dedikasi petugas imigrasi. Perjalanan ini tidak hanya tentang menikmati pemandangan, tetapi juga memahami makna pelayanan yang tulus di daerah terpencil.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Pagi itu, 8 Juli 2025 pukul 11.00 WITA, pesawat yang kami tumpangi tiba di Kota Sumbawa Besar. Itu adalah kali pertama kami—empat pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan empat jurnalis dari media nasional—menginjakkan kaki di sana. Rasa penasaran dan antusiasme langsung menyergap begitu kaki menapak di landasan. Kami sudah ditunggu oleh Kepala Seksi (Kasi) Teknologi Informasi dan Komunikasi

(Tikim) Kantor Imigrasi Sumbawa Besar Edy Heryady dan anggotanya.

Edy pun mengajak kami ke Kantor Imigrasi Sumbawa Besar, menemui kepala kantor dan bersua dengan para petugas di sana. Dengan santun, Kepala Kantor Imigrasi Sumbawa Besar Teddy Anugraha menceritakan sekelumit pengalaman dan informasi yang didapatkannya selama bertugas.

“Kalangan muda, seperti anak-anak yang akan lulus SMA, sangat rentan dengan bujuk rayu para agen

pekerja migran ilegal. Mereka biasanya mengirimkan pesan WhatsApp satu-satu dan memberikan iming-iming pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri tanpa perlu keterampilan khusus, bahkan tanpa perlu ijazah. Hal seperti ini jelas perlu diwaspadai. Oleh karena itu, kami pihak Imigrasi terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur yang sah dan sesuai prosedur,” tutur Teddy.

Menurutnya, tantangan utama dalam mengedukasi masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana perdagangan manusia (TPPM) adalah keyakinan turun-temurun yang seolah telah menjadi tradisi, bahwa bekerja ke luar negeri adalah solusi untuk meningkatkan taraf hidup. Hal

Transfer informasi keimigrasian kepada Kepala Desa di Sumbawa (Foto: Agung Kurniawan)



ini diperkuat oleh bukti nyata yang mereka lihat, seperti tetangga yang sukses membangun rumah mewah sepulang dari bekerja di luar negeri. Akibatnya, meskipun kasus kekerasan dan penipuan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) makin banyak terungkap, minat untuk bekerja ke luar negeri tetap tidak berkurang.

Teddy menambahkan, Kantor Imigrasi Sumbawa Besar tengah aktif memberikan edukasi kepada warga di Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu. "Desa Marga Karya ini punya produk unggulan, yaitu kopi, dan kami juga berkolaborasi dengan mereka untuk mengupayakan penjenamaan (*branding*) dan pemasarannya. Namun, sebelum itu, tim akan mengajak rekan-rekan ke unit kerja kami yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat," imbuhnya.

Setelah berkeliling kantor, kami langsung melanjutkan perjalanan ke Kantor Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kabupaten Sumbawa Barat yang berjarak tempuh tiga hingga empat jam. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan memukau berupa hamparan pantai pasir krem yang bersih dengan latar belakang perbukitan hijau. Keindahan alam yang masih alami ini memunculkan pertanyaan: Mengapa tempat seistimewa ini belum populer, padahal sangat layak untuk dikembangkan?

"Alasan pertama karena butuh tenaga dan biaya yang besar untuk mencapai *hidden gem* di Sumbawa Besar ini. Selain itu, Pulau Sumbawa ini adalah salah satu lokasi tambang emas terbesar di Indonesia. Jadi, fokus provinsi ini lebih kepada sektor pertambangan dibandingkan pariwisata," jelas Edy.

Senja menjelang saat kami tiba di UKK Sumbawa Besar. Kala itu, sudah tidak ada pemohon paspor yang menunggu dilayani. Edy menceritakan, petugas Kantor Imigrasi Sumbawa Besar harus menempuh perjalanan sejauh itu sebanyak dua kali seminggu, setiap Selasa dan Kamis, untuk melayani warga di sana. "Saat ini belum ada petugas yang berasal dari desa setempat, jadi petugas imigrasi dari Kota Sumbawa Besar harus pergi-pulang untuk melayani warga. Namun, ini lebih baik dibandingkan masyarakat yang harus jauh-jauh pergi ke kota untuk mengurus paspor. Lebih baik kami saja yang berkorban," tuturnya.

Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan ke Desa Marga Karya. Kepala Desa Syafaruddin beserta



Suasana kantor desa yang dijadikan tempat berbagi informasi mengenai Desa Binaan Imigrasi (Foto: Agung Kurniawan)

istri menyambut hangat dan memperkenalkan Kocimar, jenama kopi khas desa mereka yang memiliki aroma dan rasa rempah yang kuat. Produksi kopi yang melibatkan banyak perempuan setempat ini telah ada sejak 2022 dan terus mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya, termasuk setelah mengikuti pelatihan Bali Berdaya pada 2024.

"Alhamdulillah, kopi Kocimar kini menjadi salah satu produk oleh-oleh dari Sumbawa. Ada dua dusun yang sangat laris [penjualannya]. Lokasinya di Dusun Marga dan Dusun Sektor. Kopi kami memiliki keistimewaan karena bisa memberikan rasa hangat di tubuh berkat rempah-rempah pilihan yang kami campurkan dalam bubuk kopi. Untuk *branding* kopi ini, kami juga mendapatkan dukungan dari Kantor Imigrasi Sumbawa Besar," ujar Syafaruddin.

Setelah menikmati kopi Kocimar, kami melanjutkan perjalanan enam jam ke Kota Bima untuk bertemu dengan Kepala Kantor Imigrasi setempat, Joko Widodo, yang meluangkan hampir seluruh waktunya untuk menemani kami.

"Kantor Imigrasi Bima memiliki dua desa binaan, yaitu Sape dan Jatibaru. Desa Jatibaru adalah yang paling rawan calon pekerja migran ilegal. Oleh karena

itu, kami memberikan penguatan dan edukasi yang berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Kebanyakan dari calon pekerja migran ilegal ini masih di bawah umur dan umumnya berminat untuk berangkat ke Malaysia. Sebagai tindakan preventif, kami juga memeriksa dokumen persyaratan secara ketat sesuai ketentuan," tutur pria yang akrab disapa Jokowi itu.

Sape juga kerap menjadi lokasi perhelatan olahraga kapal layar internasional. Hal ini membuat Sape menjadi salah satu konsentrasi warga negara asing (WNA) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bima sehingga menjadi perhatian dalam pengawasan keimigrasian.

Kami menghabiskan senja di Pantai Panda, Teluk Bima. Pemandangan lembayung senja yang bersandingan dengan Gunung Tambora perlahan pudar, berganti dengan kegelapan malam.

Meski tak lama, persinggahan kami meninggalkan kenangan yang berkesan dan tak terlupakan. Di balik semangat petugas imigrasi, tersimpan empati dan kerendahan hati yang membuat mereka tidak hanya bekerja untuk karier, tetapi juga memberikan manfaat sebaik-baiknya kepada masyarakat. ■

Desa Binaan Imigrasi: **PELINDUNGAN DAN AKSES LAYANAN MERAMBAH PELOSOK NEGERI**

Desa Binaan Imigrasi menjadi tameng hidup bagi masyarakat Mentaya Hilir Selatan dari ancaman TPPO. Program ini juga membawa harapan bagi 15.000 warga akan akses terhadap layanan negara.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Di tengah perkebunan kelapa dan sawit yang membentang luas, delapan desa di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, kini memiliki harapan baru. Bukan hanya tentang hasil panen melimpah, melainkan juga akses yang lebih dekat terhadap layanan negara, termasuk kehadiran petugas imigrasi sebagai penjaga gerbang negeri. Pada 1 Juli 2025, Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Sampit meresmikan delapan desa tersebut sebagai Desa Binaan Imigrasi, sebuah langkah untuk mendekatkan layanan dan perlindungan keimigrasian hingga ke pelosok negeri.

Kedelapan desa ini, yaitu Basirih Hulu, Sebamban, Samuda Besar, Samuda Kecil, Jaya Kelapa, Jaya Karet, Sei Ijum, dan Handil Sohor, dihuni oleh sekitar 15.000 jiwa yang sebagian besar bergantung pada sektor perkebunan. Mereka adalah potret masyarakat Indonesia yang sering luput dari

jangkauan informasi dan layanan publik. Di sinilah petugas imigrasi berkibrah sebagai mitra melalui program Desa Binaan Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit Bayu Dewabrata didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kalimantan Tengah Mas Arie Yuliansa hadir menjadi representasi Imigrasi sebagai mitra dari kedelapan desa binaan yang baru saja diresmikan. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Kotawaringin Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan (Forkopim) Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

Program Desa Binaan Imigrasi pertama kali dicanangkan di Desa

Suasana registrasi acara peresmian Desa Binaan Imigrasi (Foto: Dok. Kanim Sampit)





Kepala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kepala Kantor Imigrasi Sampit (Foto: Dok. Kanim Sampit)

Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dan saat ini menjadi program nasional Ditjen Imigrasi. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, program ini terus berkembang sebagai langkah preventif menghadapi potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan memberikan pelayanan keimigrasian yang inklusif dan humanis.

Oleh karena itu, seluruh kantor imigrasi di Indonesia, termasuk Kantor Imigrasi Sampit, turut berkontribusi aktif dalam mendukung program nasional ini. Kontribusi ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperluas jangkauan pelayanan dan perlindungan keimigrasian hingga pelosok negeri.

Solusi dan Kolaborasi

Sebelum program ini diluncurkan, Kantor Imigrasi Sampit telah aktif melayani 13.057 permohonan paspor dan 188 layanan izin tinggal. Kantor Imigrasi Sampit juga melakukan 334 pengawasan orang asing dan 5 tindakan administrasi keimigrasian dan deportasi sejak 2024 hingga Semester I 2025. Mayoritas permohonan paspor datang dari masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah dan haji, mencerminkan tingginya semangat keagamaan di wilayah tersebut. Namun, terpencilnya lokasi desa sering kali menjadi hambatan. Alasan ini juga yang memperkuat urgensi program Desa Binaan Imigrasi sebagai solusi.

Karakteristik desa-desa di Mentaya Hilir Selatan memang berbeda dengan Desa Dolopo di Madiun yang menjadi proyek percontohan Desa Binaan Imigrasi yang dikenal sebagai kantong pekerja migran Indonesia (PMI). Masyarakat di Mentaya Hilir Selatan, dengan mata pencarian utama sebagai petani kelapa dan sawit, menghadapi

tantangan minimnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Lokasi geografis yang terpencil, yaitu di perbatasan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan, memperparah keterbatasan akses infrastruktur. Kondisi ini membuat mereka rentan menjadi sasaran TPPO. Oleh karena itu, kehadiran Imigrasi melalui program Desa Binaan Imigrasi

menjadi intervensi preventif yang sangat relevan.

“Kami percaya bahwa peningkatan literasi keimigrasian tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh elemen, terutama aparat desa. Melalui program ini, terjadi transfer pengetahuan secara langsung kepada masyarakat sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga mitra aktif dalam mencegah potensi pelanggaran keimigrasian, termasuk perdagangan orang,” jelas Bayu.

Inilah salah satu nilai penting dari hadirnya Desa Binaan Imigrasi. Program ini bukan sekadar label, melainkan sebuah upaya keras untuk membangun jejaring komunikasi dan kolaborasi yang kuat demi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Sambutan Hangat dari Masyarakat

Tanggal 1 Juli 2025 menjadi lebih dari sekadar seremoni peresmian. Antusiasme masyarakat terhadap program ini begitu tinggi. Masyarakat berharap desa-desa mereka dapat menjadi percontohan bagi desa lain di wilayah kerja Kantor Imigrasi Sampit, yang mencakup 419 desa dan 168 kelurahan di tiga kabupaten: Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan. Harapan inilah yang menjadi motivasi bagi Kantor Imigrasi Sampit untuk terus memperluas jangkauan dan memperkuat dampak program Desa Binaan Imigrasi demi menciptakan masyarakat yang cerdas, terlindungi, dan berwawasan keimigrasian.

“Tujuan kami tidak hanya membentuk desa binaan sebagai simbol kehadiran, tetapi juga menciptakan pusat literasi keimigrasian di tengah masyarakat agar mereka lebih siap dan terlindungi dalam menghadapi dinamika global,

terutama yang berkaitan dengan mobilitas antarnegara,” lanjut Bayu.

Sebelum diresmikannya program Desa Binaan Imigrasi di Mentaya Hilir Selatan, koordinasi antara kantor imigrasi dan delapan desa tersebut terbilang minim. Namun, kini hubungan tersebut telah bertransformasi menjadi sinergi yang menguat. Ketua Pimpasa (Pejabat Imigrasi Pembina Desa) Dwi Kuncoro bersama timnya—Herdik Hermawan, Saut Sirait Hamonangan, Khoirul Umam, dan Jonny Prans—bertugas memastikan seluruh program pembinaan berjalan dengan efektif.

“Program ini adalah investasi kami dalam pengetahuan dan perlindungan masyarakat. Kami bersama pemda berkomitmen penuh untuk membekali warga dengan literasi keimigrasian yang memadai, sekaligus menjadi benteng terhadap modus penipuan dan perdagangan orang yang terus mengintai,” jelas Bayu.

Bayu juga menegaskan bahwa program Desa Binaan Imigrasi akan terus digencarkan di berbagai wilayah. “Kami ingin memastikan bahwa informasi keimigrasian menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke desa-desa. Dengan begitu, risiko terhadap TPPO dan penyalahgunaan dokumen perjalanan bisa ditekan secara signifikan,” tambahnya.

Program Desa Binaan Imigrasi menunjukkan bahwa fungsi Imigrasi tidak hanya mengenai prosedur dan regulasi, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Ini adalah kisah tentang petugas imigrasi yang melangkah keluar dari balik meja, menembus keterbatasan geografis, dan hadir di tengah-tengah warga dengan membawa harapan, edukasi, dan perlindungan. Harapan mereka sederhana: agar program ini berkelanjutan sehingga literasi keimigrasian, kemudahan akses informasi, dan perlindungan dapat menjangkau seluruh masyarakat, mewujudkan semangat keimigrasian yang inklusif dan humanis hingga pelosok negeri.

“Kami optimistis, dengan sinergi bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait, cakupan Desa Binaan Imigrasi akan makin luas dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Bayu. ■

INDONESIA RESMI MERILIS VISA PENDIDIKAN NONFORMAL UNTUK WNA

Direktorat Jenderal Imigrasi merilis visa pendidikan nonformal untuk WNA serta menambah opsi masa berlaku izin tinggal untuk visa pendidikan formal. Kini, WNA memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan di Indonesia.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Mulai 15 Juli 2025, warga negara asing (WNA) dapat mengajukan visa tinggal terbatas (vitas) untuk mengikuti pendidikan nonformal di Indonesia. Kebijakan ini hadir untuk memfasilitasi WNA yang ingin mengambil kursus bahasa, sekolah keahlian atau keprofesian, dan lain-lain yang berguna menunjang karier mereka.

“Permohonan visa pendidikan nonformal dilakukan secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id. Untuk

mengajukan visa ini, WNA perlu memiliki penjamin. Penjamin tersebut bisa perseorangan atau institusi pendidikan nonformal yang dituju,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman.

Syarat untuk mengajukan visa berindeks E30 ini tidak berbeda dengan jenis visa lainnya, yaitu paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 bulan, bukti memiliki biaya hidup selama berada di wilayah Indonesia (minimal setara 2.000 dolar Amerika Serikat [AS]),

dan pasfoto terbaru berwarna. Sementara itu, biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) visa E30 adalah Rp6.000.000 untuk masa berlaku izin tinggal satu tahun dan Rp8.500.000 untuk masa berlaku izin tinggal dua tahun.

“Selain itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi juga menambahkan opsi masa berlaku izin tinggal untuk visa pendidikan formal. Visa pendidikan dasar dan menengah (indeks E30A) serta visa pendidikan tinggi (indeks E30B) kini tersedia dengan masa izin tinggal empat tahun. Sebelumnya, masa berlaku izin tinggal untuk pendidikan formal hanya satu tahun dan dua tahun,” lanjut Yuldi.

Sama seperti visa E30, pemohon visa pendidikan E30A dan E30B dapat dijamin oleh penjamin perseorangan maupun institusi pendidikan terkait. Biaya PNBP untuk visa pendidikan formal dengan masa berlaku izin tinggal empat tahun adalah Rp12.000.000. Sementara itu, untuk izin tinggal dengan masa berlaku satu tahun dan dua tahun, dikenakan biaya tiap-tiapnya Rp6.000.000 dan Rp8.500.000.

Kebijakan baru ini merupakan upaya Ditjen Imigrasi untuk mendukung peningkatan daya saing Indonesia di sektor pendidikan. Saat ini, jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 3.115, dengan 125 di antaranya merupakan perguruan tinggi negeri (PTN). Yuldi menyebutkan, universitas di Indonesia sangat berpotensi menjadi tujuan bagi pelajar asing. Selain beberapa universitas terkemuka yang masuk daftar 300 universitas terbaik di dunia, subjek atau mata kuliah yang ditawarkan oleh fakultas atau jurusan terkait ilmu budaya juga diminati oleh pelajar asing.

“Kami berharap kebijakan ini dapat membuka lebih banyak peluang bagi WNA yang ingin mengembangkan diri melalui pendidikan di Indonesia, baik formal maupun nonformal. Ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan daya saing Indonesia di kancah global melalui sektor pendidikan,” pungkas Yuldi. ■

WNA yang sedang menggunakan situs web evisa.imigrasi.go.id (ilustrasi) (Sumber: freepik.com)





Seorang perempuan sedang memegang paspor di bandara (ilustrasi). (Foto: Arif Rahman Suryaman)

Paspor Desain Merah Putih Ditinjau Ulang, **IMIGRASI FOKUS MEMPERKUAT PELAYANAN**

Setelah melalui evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi memutuskan untuk meninjau ulang implementasi paspor merah putih. Kendati demikian, upaya memperkuat paspor Republik Indonesia terus berjalan.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meninjau ulang implementasi paspor desain merah putih. Awalnya, paspor berdesain baru ini akan diterbitkan pada peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Keputusan ini diambil dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran bagi kementerian dan lembaga serta sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat.

"Setelah melalui evaluasi secara menyeluruh, Ditjen Imigrasi memutuskan untuk meninjau ulang implementasi paspor desain merah putih. Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab, serta melibatkan banyak pihak,"

ungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman.

Lebih lanjut, Yuldi menjelaskan, efisiensi anggaran mengharuskan Ditjen Imigrasi untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Keputusan tersebut juga diambil setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat, dengan memperhatikan tingkat urgensi serta dinamika ekonomi yang tengah bergulir.

Pascapeluncuran desain baru paspor pada 17 Agustus 2024 lalu, Ditjen Imigrasi aktif memantau opini publik mengenai kebijakan tersebut. Selama Agustus 2024 s.d. Juli 2025, analisis media sosial dari berbagai macam kanal mengumpulkan 1.642 sampel unggahan. Hasil analisis menunjukkan

bahwa masyarakat mengharapkan kebijakan pemerintah yang lebih fokus pada substansi paspor, yaitu penguatan posisi paspor Indonesia secara global. Dari sampel unggahan tersebut, masyarakat cenderung mengharapkan kebijakan pelayanan yang berdampak lebih konkret dan selaras dengan prinsip efisiensi serta prioritas kebutuhan publik.

Dengan anggaran yang tersedia, Ditjen Imigrasi berupaya memaksimalkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pengembangan serta pemeliharaan sistem berbasis digital. Inovasi tidak berhenti pada perubahan desain fisik, tetapi juga mencakup penguatan sistem dan pelayanan yang lebih tepat guna.

"Perlu digarisbawahi, peninjauan ulang kebijakan ini bukan berarti fokus untuk memperkuat paspor Indonesia berhenti. Langkah strategis yang melibatkan instansi pemerintah terkait serta seluruh masyarakat Indonesia diperlukan. Kami harap kita semua dapat saling mendukung guna memperkuat paspor Indonesia," tegas Yuldi.

Menanggapi hal ini, Menteri Imigrasi dan Pemasaran (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan, "Inovasi Ditjen Imigrasi akan terus berlanjut, dengan fokus pada pengembangan jangka panjang untuk memperkuat paspor Republik Indonesia. Ini akan dilakukan melalui peningkatan keamanan digital dan efisiensi pelayanan. Kami berterima kasih atas pengertian dan dukungan masyarakat dalam menghadapi penyesuaian ini." ■

Masuk Indonesia secara Ilegal, **DUA WN SPANYOL DIDEPORTASI**

Tanpa visa yang sah, dua WNA nekat masuk ke wilayah Indonesia. Alih-alih menikmati keindahan Sebatik, mereka harus berhadapan dengan tim Inteldakim yang mengawal deportasi mereka.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan mendeportasi dua warga negara asing (WNA) asal Spanyol, MBIB (52) dan ECR (44), pada Rabu (20/8). Keduanya masuk ke Indonesia secara nonprosedural melalui kawasan perairan Nunukan, Kalimantan Utara, sebelum akhirnya dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kepala Kantor Imigrasi Nunukan Adrian Soetrismo menjelaskan bahwa kasus bermula ketika MBIB dan ECR berangkat dari Dermaga Tawau, Malaysia, menggunakan perahu motor (*speedboat*) milik seorang warga negara (WN) Malaysia berinisial AS. Mereka berencana berwisata ke wilayah Sebatik, Indonesia. Namun, karena kondisi air surut di Sungai Aji Kuning, perahu motor tersebut dialihkan melalui jalur pantai hingga melewati Pos TNI AL (Posal) Sei Pancang.

"Pada saat *speedboat* merapat ke Dermaga Posal Sei Pancang, petugas melakukan pemeriksaan dan mendapati bahwa kedua WNA tersebut hanya membawa paspor tanpa melakukan pelaporan keimigrasian. Sementara itu, nakhoda kapal hanya membawa MyKad tanpa paspor. Ini jelas merupakan pelanggaran keimigrasian," jelas Adrian.

Berdasarkan aturan keimigrasian, WN Spanyol yang hendak berwisata ke Indonesia dapat menggunakan *visa on arrival* atau visa kunjungan saat kedatangan. Visa ini dapat diajukan saat prakedatangan secara daring melalui evisa.imigrasi.go.id.

Ketiganya kemudian dikawal menuju Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Nunukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa kedua WNA Spanyol itu hanya berniat

singgah sebentar di Sebatik untuk berwisata dan makan siang, lalu kembali ke Tawau. Meskipun demikian, tindakan mereka tetap dinyatakan melanggar aturan hukum keimigrasian karena masuk tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).

Kedua WNA tersebut dikenai tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) mendampingi

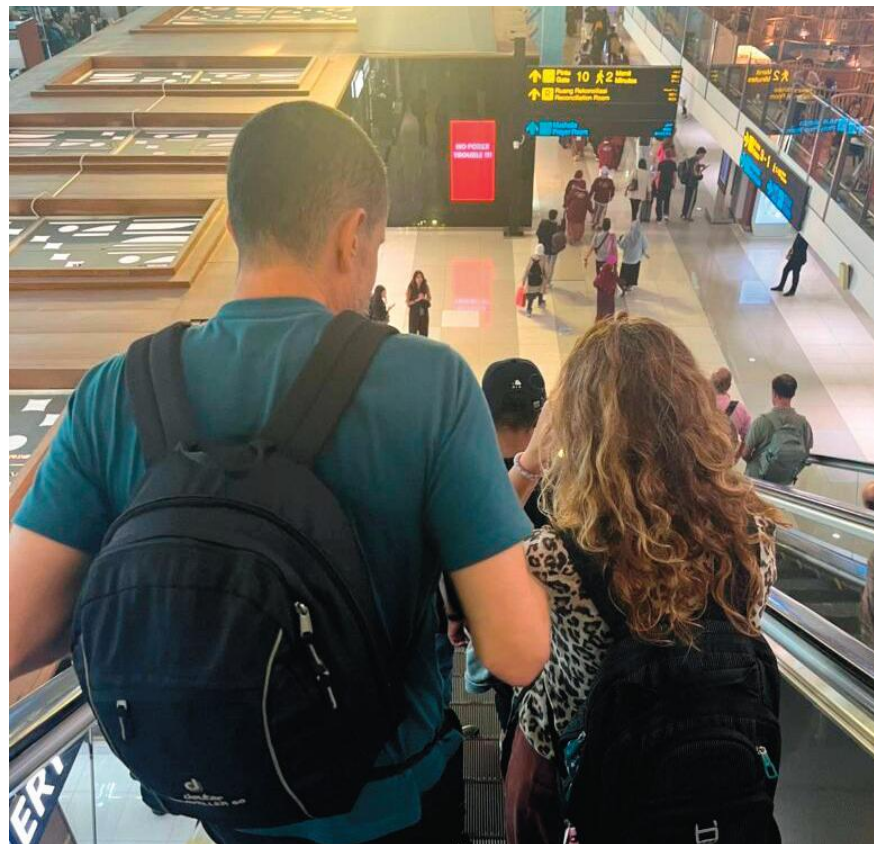
proses deportasi hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk memastikan seluruh prosedur berjalan tertib dan hak-hak dasar kedua WNA tetap dihormati. Paspor keduanya diserahkan kepada petugas konter untuk peneraan izin keluar sebelum diberangkatkan menuju negara asal.

Adrian menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara dan menegakkan hukum di bidang keimigrasian.

"Deportasi adalah bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan setiap orang yang berada di wilayah Indonesia mematuhi aturan yang berlaku," tutup Adrian. ■

Sumber: Seksi Tikim Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi Nunukan mendeportasi 2 WN Spanyol lewat Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Foto: Dok. Kanim Nunukan)





Pelatihan bahasa Mandarin oleh Fipit Iaoshi(guru)(Foto: Dok. Perpustakaan Ditjen Imigrasi)

BELAJAR BAHASA ASING DI PERPUSTAKAAN DITJEN IMIGRASI

Tak hanya untuk membaca, Perpustakaan Ditjen Imigrasi menerapkan konsep *coworking space*. Pelatihan bahasa asing untuk pegawai juga menjadi wujud komitmen dalam meningkatkan pelayanan bertaraf internasional.

■ Penulis: Fipit Fatimah

Perpustakaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan. Sebelumnya, Perpustakaan Ditjen Imigrasi telah mendapatkan akreditasi A dalam kategori Perpustakaan Khusus pada akhir tahun 2024. Saat ini, Perpustakaan Ditjen Imigrasi berkolaborasi dengan Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Imigrasi sedang menyelenggarakan pelatihan bahasa Mandarin dan bahasa Jepang untuk meningkatkan kompetensi pegawai Imigrasi.

Kegiatan yang diselenggarakan setiap hari Selasa di ruang perpustakaan lantai 10 ini merupakan salah satu rekomendasi dari asesori pada saat

akreditasi. Tujuannya adalah agar Perpustakaan Ditjen Imigrasi dapat melakukan variasi layanan kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dan menjadi inovasi di bidang layanan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bahasa asing pegawai Ditjen Imigrasi sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga negara asing (WNA).

Pelatihan ini juga merupakan pengembangan dari konsep *coworking space* yang sedang digalakkan. Konsep ini memungkinkan pegawai untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam mempelajari bahasa asing. Pengajarnya adalah pengelola Perpustakaan Ditjen Imigrasi

yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 1 orang lulusan Sastra Cina, 3 orang lulusan Sastra Jepang, dan 1 orang lulusan Manajemen.

Awalnya, target peserta adalah sepuluh orang untuk tiap-tiap kelas bahasa. Namun, ketika pendaftaran dibuka melalui nota dinas yang disebar di lingkungan Ditjen Imigrasi, pegawai yang mendaftar jauh melebihi kuota awal. Sebanyak 125 pegawai mendaftar untuk kelas bahasa Mandarin dan 145 pegawai untuk kelas bahasa Jepang. Antusiasme yang tinggi ini mengharuskan panitia membagi peserta menjadi lima gelombang untuk kelas bahasa Mandarin dan enam gelombang untuk kelas bahasa Jepang, dengan tiap-tiap gelombang berisi 25 peserta.

Gelombang 1 untuk kedua kelas bahasa dimulai pada 22 Juli dan direncanakan berakhir pada 7 Oktober. Sementara itu, gelombang 2 dimulai pada 29 Juli dan akan berakhir pada 15 Oktober.

Materi pelatihan meliputi dasar-dasar bahasa Mandarin dan Jepang, seperti pengenalan aksara, kosakata, dan tata bahasa. Diharapkan pegawai yang mengikuti pelatihan ini dapat menggunakan bahasa Mandarin dan Jepang dalam kalimat sederhana sesuai dengan kaidah bahasa masing-masing.

Dalam jangka panjang, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bahasa asing pegawai Ditjen Imigrasi dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Perpustakaan Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi pegawai melalui berbagai pelatihan yang relevan dan bermanfaat. ■

Rahmi-sensei dan Febri-sensei(guru) sedang memberikan materi di kelas bahasa Jepang. (Foto: Dok. Perpustakaan Ditjen Imigrasi)



8 WARGA NEGARA UZBEKISTAN DIAMANKAN DI PERBATASAN RI-RDTL

Sejumlah 8 WNA Uzbekistan dijerat TPPO modus baru. Seorang WNI diduga menjadi dalang yang memfasilitasi jalur ilegal menuju Australia via Timor Leste.

Imigrasi Kelas II TPI Atambua dan Polres Belu berhasil mengamankan delapan warga negara asing (WNA) asal Uzbekistan di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste (RI-RDTL). Para WNA tersebut diduga terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus baru.

Kepala Kantor Imigrasi Atambua Putu Agus Eka Putra mengungkapkan bahwa penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat pada 25 Agustus lalu. Pihak Imigrasi dan Polres Belu segera menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan delapan WNA yang sedang menaiki perahu kayu di Pantai Berluli, Desa Dualaus, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka diduga akan menggunakan

jalur laut ilegal menuju Timor Leste dan Australia.

"Kedelapan WNA ini menggunakan *visa on arrival* sebagai kedok wisatawan," ujar Putu Agus dalam konferensi pers, Sabtu (30/8). Ia menambahkan bahwa para WNA ini difasilitasi oleh seorang WNI berinisial BI yang diduga membantu mengatur jalur keberangkatan. Delapan WNA tersebut berinisial SA, ORY, OUB, SSA, ET, YYT, UY, dan MK dan memiliki paspor dengan masa berlaku yang bervariasi.

Tim gabungan Imigrasi dan Satuan Intelijen Keamanan (Intelkam) Polres Belu sempat melakukan pengintaian di lokasi. Para WNA terlihat menaiki perahu kayu, tetapi batal berangkat karena air laut surut.

Sekitar pukul 20.40 WITA, petugas memutuskan untuk melakukan

pemeriksaan karena kondisi penangan minimal dan khawatir para WNA melarikan diri. Mereka kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Atambua.

Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa pergerakan delapan WN Uzbekistan tersebut memiliki pola tersendiri sebelum akhirnya sampai di Belu. Mereka sempat transit di Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan ke Kupang lalu ke Atambua. Dokumen perjalanan mereka resmi dengan visa dan izin tinggal. Mereka bergerak secara terpisah dari satu sama lain di tiap-tiap titik. Cara ini menjadi kedok untuk menyamarkan maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya selama beraktivitas di wilayah Indonesia.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan kedelapan WNA Uzbekistan tersebut merupakan korban penyelundupan

manusia yang difasilitasi oleh seorang WNI berinisial BI," ujar Putu Agus.

Pola baru penyelundupan manusia ini kini menasar Kabupaten Belu sebagai jalur keluar-masuk ilegal. Lokasi ini dianggap strategis karena dekat dengan Timor Leste dan Australia.

Putu Agus juga menegaskan, delapan WN Uzbekistan tersebut akan dikenai deportasi dan penangkalan. "Langkah ini untuk memberi efek jera sekaligus mencegah terulangnya praktik serupa melalui jalur berbeda di Indonesia," tutupnya. ■

Sumber: Seksi Tikim Kantor Imigrasi Atambua

Delapan WN Uzbekistan yang diamankan Kantor Imigrasi Atambua (Foto: Dok. Kanim Atambua)



Layanan Percepatan Penerbitan Paspor Sabtu—Minggu

HANYA MELAYANI
PERMOHONAN
PASPOR BARU &
PENGANTIAN
PASPOR

Hadir di lokasi berikut:

Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3)
Lippo Mall Puri Lantai Basemen
Waktu pelayanan: 08.30—11.00 WIB

Unit Layanan Paspor (ULP)
Pasar Pagi Mangga Dua
Waktu pelayanan: 09.00—11.00 WIB

UP3 Lippo Mall Kemang
Area Parkir 5B Lantai 2
Waktu pelayanan: 10.30—11.00 WIB

UP3 Terminal 3 Internasional
Bandara Soekarno-Hatta
Waktu pelayanan: 09.00—11.00 WIB

UP3 Plaza Semanggi
Waktu pelayanan: 09.30—12.00 WIB

UP3 Mall Cibubur Junction
Waktu pelayanan: 09.00—11.00 WIB



Siapkan Dokumen Persyaratan

- Bagi pemohon dewasa:
 - KTP-el, kartu keluarga (KK), akta kelahiran/ijazah/buku nikah/surat baptis
 - Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)
- Bagi pemohon anak di bawah umur:
 - KTP-el orang tua, KK, akta kelahiran/surat baptis
 - Bukti menikah orang tua yang sah
 - Paspor orang tua (pendamping)
 - Paspor lama (bagi yang telah memiliki paspor)

Dapatkan informasi lebih lanjut melalui Instagram: @kanimjaksel, @kanimjakpus_, @imigrasi.soekarnohatta, @imigrasi_jakut, @imigrasi_jakbar, @imigrasijaktim.



Siaran pers yang dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi Merauke mengenai WN Tiongkok yang diduga melecehkan masyarakat adat Asmat (Foto: Dok. Kanim Merauke)

LECEHKAN MASYARAKAT ADAT ASMAT DEMI KONTEN, WN TIONGKOK DIAMANKAN

Dari visa kunjungan bisnis hingga konten SARA yang viral, SW diduga sengaja memanfaatkan masyarakat adat Asmat sebagai bahan eksploitasi digital. Aksinya berujung pada ancaman deportasi dan pencabutan izin tinggal.

Seorang warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial SW diamankan oleh Kantor Imigrasi Merauke di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, atas dugaan pelanggaran izin tinggal dan pelecehan terhadap masyarakat adat Asmat, Papua Selatan.

SW masuk ke Indonesia pada 5 Juni 2025 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan visa kunjungan B1. Lalu, ia melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Asmat via Mimika.

Atas tindakannya, SW dijerat dengan Pasal 122 huruf a jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena menggunakan izin tinggal kunjungan untuk kepentingan lain yang bukan peruntukannya.

SW juga diduga melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat adat Asmat.

la melakukan sebuah pelecehan dan memanfaatkan konten secara tidak etis dengan mengorbankan martabat mereka.

Dugaan Pelecehan dan Eksploitasi Konten

SW dilaporkan melakukan pelecehan verbal terhadap masyarakat adat Asmat dengan menggunakan bahasa kasar dan menyebut warga suku Asmat sebagai "kanibal". Laporan ini disampaikan oleh komunitas lokal di Kabupaten Asmat yang merasa martabat mereka direndahkan.

"Ucapan-ucapan yang disampaikan SW sangat kasar dan merendahkan harkat masyarakat setempat. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan juga isu kemanusiaan," jelas Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi

Merauke Aditya Mardya Bhakti dalam konferensi pers pada Rabu (23/7).

SW juga diduga melakukan eksploitasi konten. Selama di Asmat, SW aktif membuat konten media sosial. Namun, konten media sosial SW terindikasi menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta melecehkan kalangan perempuan dan anak-anak. Tindakan tersebut ditengarai hanya bertujuan menaikkan jumlah tayangan (views) untuk kepentingan komersial, seperti memasarkan produk suplemen, pasta gigi, dan alat peraga melalui media sosial.

"Konten yang dibuatnya hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebab, ketika views naik, yang bersangkutan mulai menjual produk-produknya," tambah Aditya.

Saat ini, Imigrasi bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Bidang Siber untuk mengekstrak data dari perangkat milik SW meskipun beberapa video yang sempat diunggah SW telah dihapus.

Status Hukum dan Langkah Selanjutnya

Hingga saat ini, SW masih berstatus sebagai terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Proses penyelidikan masih terus berjalan. Jika statusnya meningkat menjadi tersangka, SW akan diberikan hak pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

SW diketahui masuk ke Indonesia tanpa melalui agen atau sponsor dan seluruh kegiatannya dilakukan secara pribadi. Ia melanjutkan perjalanan dari Jakarta ke Dubai, lalu Mimika, dan terakhir ke Asmat.

Jika terbukti bersalah, SW terancam dideportasi dan dicekal untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia. Izin tinggalnya yang seharusnya berlaku hingga awal Agustus 2025 telah gugur karena proses hukum yang sedang berjalan. Imigrasi juga tengah menyiapkan laporan resmi kepada Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta terkait kasus ini.

Imigrasi menyatakan bahwa pemantauan pergerakan WNA di dalam negeri sangat bergantung pada laporan masyarakat dan kerja sama antarinstansi. Sebab, sistem keimigrasian nasional tidak memantau perpindahan domestik WNA secara otomatis. ■

Sumber: Seksi Tikim Kantor Imigrasi Merauke

Diduga Terlibat Sindikat Penyelundupan Manusia, **16 WN BANGLADESH DIAMANKAN IMIGRASI MATARAM**

Tim Direktorat Intelijen Keimigrasian mendeteksi adanya aktivitas sindikat penyelundupan manusia yang melibatkan 16 warga negara Bangladesh. Pengamanan dilaksanakan dalam operasi gabungan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mengamankan 16 warga negara (WN) Bangladesh pada Kamis (24/7) di kawasan perumahan Desa Batu Layar Barat, Kabupaten Lombok Barat. Keenam belas warga negara asing (WNA) tersebut diduga terlibat dalam sindikat tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM). Mereka diamankan dari tiga rumah sewaan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Mirza Akbar menjelaskan tindak pengamanan diambil berdasarkan informasi dari Tim Direktorat Intelijen Keimigrasian (Ditintelkim). Tim mendeteksi adanya aktivitas sindikat TPPM yang menargetkan Australia sebagai tujuan akhir. Atas dugaan tersebut, 16 WN Bangladesh diamankan oleh petugas dalam kegiatan operasi gabungan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama Ditintelkim Ditjen Imigrasi dengan didampingi pihak kepolisian.

"Pengamanan ini dilakukan berdasarkan informasi awal dari Tim Ditintelkim yang mendeteksi adanya aktivitas sindikat penyelundupan manusia dengan tujuan akhir Australia," ungkap Mirza Akbar di kantornya, Senin (28/7).

Dari 16 WN Bangladesh yang diamankan, Mirza menjelaskan bahwa satu orang berinisial SJ (33) diduga kuat sebagai pemimpin sindikat. Sementara itu, sembilan orang lainnya berperan sebagai agen yang bertugas merekrut dan mengumpulkan calon korban. Sementara itu, enam orang sisanya merupakan korban yang telah ditipu dan diperas secara finansial dengan iming-iming akan diberangkatkan ke Australia.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Iqbal Rifai menambahkan

bahwa para korban ini diberangkatkan dari Malaysia menuju Kota Dumai, Riau, melalui jalur tikus. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan darat dan sempat menginap di Jakarta dan Bali sebelum akhirnya tiba di Lombok. Rencananya, mereka akan dikirim ke Australia melalui jalur laut via Lombok Timur.

Barang bukti yang berhasil diamankan dalam operasi ini meliputi 10 paspor dan 16 unit ponsel. Saat ini, keenam belas WN Bangladesh tersebut telah ditempatkan di ruang detensi Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pendalaman, para WNA tersebut diduga melanggar Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Mereka juga diduga melanggar Pasal 119 ayat (1) karena berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah. Mirza menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat pengawasan dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk sindikat penyelundupan manusia. ■

Sumber: Seksi Tikim Kantor Imigrasi Mataram

Proses konferensi pers di Kantor Imigrasi Mataram (Foto: Dok. Kanim Mataram)



Jaga Stabilitas dan Keamanan Wilayah, **SATGAS PATROLI IMIGRASI DIKUKUHKAN**



Deretan mobil Satgas Patroli Imigrasi yang siap bertugas
(Foto: Tommy Ariyanto)

Imigrasi Indonesia menegaskan perannya dalam pengawasan orang asing. Satgas Patroli Imigrasi dikukuhkan di Bali dengan dihadiri 500 peserta.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Republik Indonesia (RI) Agus Andrianto mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi di wilayah Bali pada Selasa (5/8) dalam upacara pengukuhan di Pelabuhan Benoa, Denpasar. Upacara pengukuhan ini dihadiri oleh sekitar 500 peserta dari unsur Imigrasi, Pemasarakatan, TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (PP), dan Pecalang. Selain dari jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, pengukuhan juga disaksikan langsung oleh Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX/ Udayana, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan sejumlah kepala instansi vertikal serta dinas tingkat provinsi di Bali.

Pengukuhan Satgas Patroli Imigrasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI. Selain itu, pengukuhan ini sekaligus menjadi penegas peran Imigrasi sebagai sektor unggulan (*leading sector*) dalam pengawasan orang asing.

"Pembentukan Satgas Patroli Imigrasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memastikan

stabilitas dan keamanan di Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama Indonesia," jelas Agus.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa Satgas Patroli Imigrasi dibentuk agar Imigrasi bisa merespons cepat saat pelanggaran terjadi, menekan kejadian pelanggaran oleh orang asing di Bali, serta menghadirkan rasa aman di masyarakat. Untuk memastikan patroli berjalan efektif, Satgas akan melibatkan 100 orang petugas imigrasi. Setiap personel akan dilengkapi dengan rompi pengaman dan kamera tubuh (*body camera/bodycam*). Para petugas ini akan berpatroli dengan menggunakan motor atau mobil patroli Imigrasi di sepuluh titik strategis yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Denpasar.

Terkait hal ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan, "Komandan Tim (Dantim) dan petugas patroli akan berpatroli pada rute yang telah ditentukan, terutama di area rawan pelanggaran keimigrasian atau daerah tempat kegiatan warga negara asing (WNA) terkonsentrasi. Jadwal

pergerakan patroli dilakukan secara berkala dan acak untuk menghindari pola yang mudah ditebak," jelas Yuldi.

Pengukuhan Satgas Patroli Imigrasi juga memperkuat komitmen Imigrasi yang telah menunjukkan capaian kinerja signifikan. Berdasarkan data statistik, Ditjen Imigrasi telah melakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi sebanyak 607 kasus dan detensi sebanyak 303 kasus pada periode November–Desember 2024. Angka tersebut meningkat pesat pada periode Januari–Juli 2025 dengan 2.669 deportasi dan 2.009 detensi. Sementara itu, jumlah orang asing yang diproses hukum selama periode November 2024–Juli 2025 mencapai 62 orang.

"Ke depannya, kami akan terus menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal, seperti patroli rutin satgas, maupun skala nasional, seperti Wira Waspada. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Imigrasi," tutup Yuldi. ■

MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL, 11 WN VIETNAM DISERGAP DI KLINIK KECANTIKAN

Sebelas WN Vietnam diamankan di sebuah klinik kecantikan karena diduga menyalahgunakan izin tinggal. Sikap tidak kooperatif ditunjukkan dengan mengunci ruangan dan bersembunyi di *rooftop*.

■ Penulis: Roro Aditya Citraningtyas Ningrum

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan 11 warga negara (WN) Vietnam dari sebuah klinik kecantikan di bilangan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia. Pengamanan tersebut dilakukan dalam operasi pengawasan keimigrasian yang dilakukan di tiga klinik kecantikan di Jakarta pada Sabtu (9/8).

Tim Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) yang bertugas terbagi menjadi dua tim. Tim pertama melakukan penyisiran di dua klinik kecantikan di Jakarta Pusat, sementara tim kedua menyisir sebuah klinik kecantikan di PIK, Jakarta Utara. Pada klinik di Jakarta Pusat, tim Ditwasdakim mendapati sejumlah tenaga kerja asing (TKA) berkewarganegaraan Vietnam.

Berdasarkan pemeriksaan, tidak terindikasi penyalahgunaan izin tinggal oleh TKA di kedua lokasi tersebut.

"Kami menemukan adanya dugaan pelanggaran keimigrasian di klinik yang berlokasi di PIK. Pihak klinik bersikap kurang kooperatif terhadap petugas dan mengklaim tidak ada WNA yang bekerja di sana, sementara tim kami menemukan sebelas WN asal Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman.

Tidak hanya itu, tim Ditwasdakim juga menemukan satu paspor WN Vietnam berinisial NTH tanpa kehadiran pemilikinya. Salah seorang staf klinik yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) juga menunjukkan sikap tidak kooperatif dengan mengunci ruangan sehingga petugas harus membuka akses secara mandiri. Seorang WN Vietnam juga menunjukkan sikap tidak kooperatif dengan mencoba mengunci pintu ruang pemeriksaan dan bersembunyi di *rooftop* gedung.

Kesebelas WN Vietnam beserta seorang WNI yang terlibat tersebut sempat dibawa ke Ditjen Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan, Imigrasi memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi terhadap kesebelas WNA tersebut. Delapan orang di antaranya dideportasi pada Senin (11/8) dengan maskapai Vietnam Air. Sementara itu, tiga orang lainnya menyusul dideportasi pada Selasa (12/8) dengan menggunakan maskapai Vietjet Air.

"Setiap pelanggaran keimigrasian akan kami tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami mengimbau seluruh pihak untuk kooperatif dalam proses pemeriksaan karena ini adalah bagian penting upaya Imigrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat," pungkas Yuldi Yusman. ■

Sejumlah WNA yang sedang diwawancarai oleh petugas imigrasi (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)



Operasi Wira Waspada di Seluruh Indonesia

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri, Elyan Nadian Zahara

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melaksanakan operasi pengawasan orang asing serentak tahun 2025 bertajuk Wira Waspada pada Selasa (15/7) hingga Kamis (17/7). Dalam operasi yang dilaksanakan di 2.098 titik pengawasan seluruh Indonesia ini, petugas imigrasi memeriksa 2.022 orang warga negara asing (WNA). Dari hasil pemeriksaan, 294 WNA terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

Sebagian besar WNA yang diperiksa berasal dari Tiongkok dengan jumlah mencapai 1.143 orang, disusul Korea Selatan sebanyak 156 orang, Jepang 81 orang, India 74 orang, dan Malaysia 71 orang. Sementara itu, WNA asal Filipina tercatat sebanyak 60 orang, Amerika

Serikat 46 orang, Thailand 39 orang, Belanda 29 orang, dan Yaman 28 orang.

Berdasarkan jenis izin tinggal yang dimiliki, mayoritas WNA yang diperiksa berada di Indonesia dengan izin tinggal terbatas sejumlah 1.581 orang. Sebanyak 326 orang menggunakan izin tinggal kunjungan, sedangkan sisanya terdiri atas pemegang izin tinggal tetap (42 orang), pencari suaka UNHCR (43 orang), imigran ilegal (12 orang), dan WNA yang tidak memiliki izin tinggal sama sekali sebanyak 16 orang.

Jenis pelanggaran keimigrasian yang paling banyak ditemukan adalah penyalahgunaan izin tinggal dengan jumlah 148 kasus. Selain itu, terdapat 34 kasus WNA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau izin tinggal saat diminta oleh petugas. Pelanggaran

lainnya meliputi tinggal lajak (overstay) sebanyak 29 kasus, alamat tidak sesuai dengan izin tinggal atau belum melakukan mutasi alamat sejumlah 25 kasus, serta penggunaan sponsor fiktif sebanyak 8 kasus.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa 294 WNA yang terindikasi melakukan pelanggaran saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Jika pelanggaran yang dilakukan masuk dalam lingkup keimigrasian, WNA akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang (UU) Keimigrasian. Apabila terdapat dugaan tindak pidana umum, WNA yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak berwenang. ■

Potret petugas imigrasi saat melaksanakan Operasi Wira Waspada di seluruh Indonesia (Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)





WN Tiongkok pelaku penipuan senilai 28,5 miliar ditangkap. (Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)

WN Tiongkok Pelaku Penipuan Senilai 28,5 Miliar Ditangkap

Pada Kamis dini hari (10/7) di Tabanan, Bali, Ditjen Imigrasi berhasil mengamankan seorang warga negara (WN) Tiongkok berinisial XP yang masuk dalam daftar buronan internasional (Red Notice). XP menghadapi tuduhan tindak pidana penipuan terhadap 16 toko makanan laut di daerah Yide Road, Tiongkok. Total kerugian yang disebabkan berkisar 12.698.600 RMB atau 28,5 miliar rupiah sejak September 2014. Ia didakwa bersalah atas kasus penipuan oleh Kejaksaan Guangzhou, Tiongkok pada 21 Januari 2015.

"Penangkapan XP dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kedutaan Besar Tiongkok tertanggal 19 Maret 2025. Tim Penyidikan Ditjen Imigrasi kemudian melakukan upaya penyidikan mendalam serta berkoordinasi secara intensif dengan Kedutaan Besar Tiongkok dan Ministry of Public Security di Tiongkok. XP juga sudah dimasukkan ke dalam daftar

pengecahan Ditjen Imigrasi mulai 24 Maret 2025," ujar Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman.

Pada Rabu (9/7), tim gabungan Subdit Penyidikan Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi Denpasar melakukan pemantauan di lokasi target operasi pada pukul 19.30 WITA. Selanjutnya, pada Kamis (10/7) pukul 00.30 WITA, tim kembali menuju lokasi kediaman XP untuk mengeksekusi penangkapan. Tim berhasil mengamankan XP pada pukul 01.30 WITA. Pada pukul 02.00 WITA, XP dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk diperiksa dalam rangka pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP).

"Proses pemulangan akan kami lakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan serta prinsip kerja sama internasional," ujar Yuldi. ■

9 WNA Pelaku Love Scamming Dideportasi

Ditjen Imigrasi mendeportasi dan memasukkan sembilan WNA ke dalam daftar cekal. Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan (*scamming*) daring. Sebelumnya, enam orang di antaranya, yang terdiri atas empat WN Tiongkok, satu WN Ghana, dan satu WN Nigeria ditangkap dalam sebuah operasi pengawasan di Jakarta Utara pada Rabu (11/6) lalu. Sementara itu, dua orang lainnya merupakan WN Tiongkok yang ditangkap di Bali pada Kamis (19/6) berdasarkan pengembangan pemeriksaan satu WN Tiongkok oleh Ditjen Imigrasi pada Senin (16/6).

"Berdasarkan pemeriksaan dan barang bukti, sembilan WNA tersebut dijerat Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian karena melanggar izin tinggal. Mereka melakukan penipuan *online* dengan modus *love scamming* yang berujung pada pemerasan korban," jelas Plt. Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman.

Dari operasi di Jakarta Utara, petugas menemukan barang bukti berupa 40 unit ponsel pintar dan 2 unit iPad. Sementara itu, petugas menyita 76 unit ponsel pintar, 7 unit iPad, dan 3 unit laptop di Bali.

"Kami dapati masih ada tiga WN Tiongkok lain di grup Love Scamming Jakarta dan 7 WN Tiongkok di grup Love Scamming Bali. Mereka telah kami masukkan ke daftar cekal Ditjen Imigrasi," papar Yuldi.

Yuldi menambahkan, tujuh WN Tiongkok menargetkan korban asal Tiongkok juga, sementara WN Ghana dan WN Nigeria menysasar WNA. ■



WNA pelaku love scamming tangkapan Imigrasi Jakarta Utara yang akan dideportasi (Foto: Dok. Ditjen Imigrasi)

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pati mengadakan sosialisasi Tunas Imigrasi di SMA Negeri 1 Blora pada Selasa (15/7).

Sosialisasi ini dihadiri oleh 100 perwakilan siswa dari SMA/SMK/MA se-Kabupaten Blora.

Tunas Imigrasi merupakan program edukasi keimigrasian yang dicanangkan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pati. Program ini menyasar pelajar usia sekolah menengah akhir (SMA). Tujuannya adalah meningkatkan taraf literasi keimigrasian melalui penyebaran informasi yang benar serta membantu generasi muda mengenali modus-modus kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).

Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pati Ahmad Zaeni menekankan peran penting para siswa dalam pencegahan TPPO/TPPM. "Korban TPPO/TPPM sebagian besar adalah usia produktif. Teman-teman bisa menjadi perpanjangan tangan Imigrasi untuk



Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia menyampaikan materi. (Foto: Dok. Tim Humas Imigrasi Pati)

Cegah Perdagangan Orang, **SOSIALISASI TUNAS IMIGRASI HADIR UNTUK PELAJAR PATI**

Sosialisasi Tunas Imigrasi kembali diadakan di Pati. Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pati menyasar para pelajar SMA dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM.

■ Penulis: Junaidul Fitriyono

memberikan informasi yang benar tentang peluang kerja di luar negeri atau modus yang sering digunakan pelaku," ujar Zaeni.

Perwakilan Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah Sarwandi mengapresiasi pemilihan Blora sebagai lokasi sosialisasi, mengingat tidak sedikit pekerja migran Indonesia (PMI) yang berasal dari daerah tersebut. "Sosialisasi ini sangat tepat untuk memberikan informasi kepada anak muda tentang bahaya TPPO/TPPM," ujar Sarwandi.

Selain membahas pencegahan TPPO dan TPPM, sosialisasi ini juga menghadirkan Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia Jurusan Keimigrasian yang memperkenalkan sekolah kedinasan keimigrasian kepada para siswa. Tujuannya adalah memberikan motivasi kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka, salah satunya di sekolah kedinasan keimigrasian.

Antusiasme peserta terlihat jelas selama sesi diskusi. Ega Yusni, salah satu siswa SMA Negeri 1 Blora, bahkan sempat mengisahkan pengalamannya. "Saya cukup prihatin dengan fenomena

ini karena saya pribadi sempat ditawarkan untuk bekerja di luar negeri. Bagi saya nominal gajinya fantastis, tetapi anehnya informasi mengenai pekerjaannya *ndak* jelas," ujar Ega.

Pengalaman Ega pun menjadi perhatian tersendiri bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pati untuk ditindaklanjuti serta memastikan agar masyarakat Blora tidak menjadi korban TPPO/TPPM.

Sosialisasi Tunas Imigrasi juga pernah diselenggarakan pada 2024 di tiga kabupaten, yaitu Jepara, Pati, dan Blora. Melalui program ini, diharapkan "tunas-tunas Imigrasi" dapat menjadi agen literasi keimigrasian, baik ke kawan sebayanya maupun masyarakat sekitar tempat tinggal, agar TPPO dan TPPM dapat dicegah. ■

IMOX 2025: DUKUNGAN IMIGRASI UNTUK INDUSTRI MARITIM BATAM

WNA dan perusahaan sponsor mendominasi kunjungan di stan Imigrasi pada ekshibisi IMOX 2025. Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia menunjukkan dukungannya pada industri maritim Batam.

■ Penulis: Riski Amalia

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Kantor Imigrasi Batam berpartisipasi dalam Indonesia Marine & Offshore Expo (IMOX) 2025 yang berlangsung pada 6–8 Agustus 2025 di Radisson Golf & Convention Center Batam. Partisipasi ini merupakan dukungan Imigrasi terhadap Kota Batam sebagai destinasi investasi, khususnya di sektor maritim.

Dalam acara tersebut, Imigrasi membuka stan konsultasi bagi warga negara asing (WNA) yang ingin

bertanya seputar visa dan izin tinggal. Menurut Yolanda Rosylvia Juniar, Ketua Tim Pengelolaan Informasi Publik, stan Imigrasi menjadi salah satu titik yang paling ramai dikunjungi.

Selama tiga hari pameran, stan Imigrasi dikunjungi oleh lebih dari 300 pengunjung dalam negeri maupun mancanegara. Berbeda dengan ekshibisi sebelumnya, mayoritas pengunjung kali ini adalah WNA dan perusahaan sponsor.

“Pertanyaan yang paling banyak muncul berkisar pada aturan terbaru

tentang visa dan izin tinggal, terutama untuk keperluan bekerja di Indonesia dan pemasangan alat,” jelas Yolanda.

Peran Strategis Imigrasi

Lebih dari sekadar menyediakan layanan informasi, partisipasi Imigrasi di IMOX 2025 menjadi ajang untuk membangun citra positif di mata internasional. Kehadiran Imigrasi menunjukkan bahwa Indonesia terbuka untuk kerja sama internasional, termasuk di sektor maritim. Selain itu, Indonesia siap mendukung mobilitas tenaga kerja asing, investor, dan mitra internasional melalui kebijakan keimigrasian yang responsif.

Kepala Kadin Batam Jadi Rajagukguk menyebut bahwa industri maritim di Batam berkembang pesat setiap tahunnya. Sektor ini berperan penting dalam mendorong ekspor nonmigas, menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, dan mendukung target investasi nasional. Partisipasi Ditjen Imigrasi di sektor ini diharapkan dapat mendorong suksesnya kolaborasi dan investasi baru yang memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan industri maritim di Batam.

IMOX 2025 dan Potensi Batam

Mengusung tema *Indonesia's Maritime Engine: Advancing Shipbuilding & Offshore Excellence from Batam*, IMOX 2025 menjadi platform untuk bertukar gagasan, memamerkan teknologi terkini, dan menjajaki kolaborasi. Ekshibisi yang diselenggarakan oleh Kadin Batam ini menghadirkan lebih dari 200 peserta pameran dan menarik lebih dari sekitar 6.000 pengunjung mancanegara.

Acara ini mempertemukan para pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pengetahuan dan memamerkan inovasi teknologi terbaru di bidang maritim dan *offshore*. Potensi Batam sebagai lokomotif perekonomian Indonesia juga mendapat perhatian khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 dan 28 Tahun 2025 serta perubahan pada PP Nomor 46 Tahun 2021. ■

Suasana keramaian stan Ditjen Imigrasi di IMOX 2025 Batam (Foto: Agung Kurniawan)





Menteri Imipias beserta jajaran berbincang dengan pengunjung Immigration Lounge. (Foto: Aditdja Pratama Gegana Uwen)

IMMIGRATION LOUNGE KINI HADIR DI KEBAYORAN PARK MALL

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Selatan menambah unit kerja. Kini, masyarakat bisa melakukan pengurusan paspor di Kebayoran Park Mall.

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipias) Republik Indonesia Agus Andrianto meresmikan Immigration Lounge Kebayoran Park Mall pada Kamis (24/7). Lounge yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Selatan ini berlokasi di Lantai UG, Kebayoran Park Mall, Jl. Raya Kebayoran Lama No.17, Jakarta Selatan. Lounge ini

merupakan lounge kedua milik Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, sekaligus lounge kedelapan secara nasional dan keempat di wilayah DKI Jakarta.

"Immigration Lounge di Kebayoran Park Mall [ini] kami harapkan dapat menghadirkan layanan keimigrasian yang makin dekat dan mudah diakses, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat," tutur Agus Andrianto dalam sambutannya.

Pemilihan Kebayoran Park Mall sebagai lokasi layanan bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah Pesanggrahan, Ciledug, dan sekitarnya. Mal ini merupakan pusat aktivitas masyarakat yang ramai dan mudah diakses dari berbagai arah, termasuk melalui jalur tol lingkar luar Pantai Indah Kapuk (PIK) yang hanya berjarak sekitar 15 menit.

Immigration Lounge Kebayoran Park Mall menyediakan layanan permohonan paspor baru dan penggantian paspor, khusus untuk jenis paspor elektronik (e-paspor). Lounge ini beroperasi pada Senin s.d. Jumat, pukul 08.00–16.00 WIB, kecuali hari libur nasional. Selain layanan reguler, tersedia juga layanan percepatan paspor satu hari selesai.

Setiap harinya, lounge ini melayani hingga 50 pemohon yang terdiri atas 25 kuota layanan percepatan dan 25 kuota layanan reguler. Pemohon wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor sebelum mengurus paspor di lounge ini.

Dengan peresmian ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Selatan memiliki enam unit kerja, yaitu satu kantor utama yang beralamat di Warung Buncit, dua Unit Layanan Paspor (ULP) masing-masing di Pondok Pinang dan Lippo Mall Kemang, satu unit kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) DKI Jakarta di Karet Kuningan, dan dua Immigration Lounge masing-masing di Pondok Indah Mall 3 dan Kebayoran Park Mall. Sepanjang 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Selatan telah menerbitkan 195.211 paspor atau rata-rata 814 paspor per hari.

Agus menyebutkan, dengan menyebar lokasi pelayanan, jumlah pemohon layanan keimigrasian menjadi lebih terdistribusi. Hal ini secara langsung akan mengurangi panjangnya antrean dan waktu tunggu yang biasa dialami pemohon. Dengan demikian, proses mengajukan paspor menjadi lebih efektif dan efisien.

"Kepada seluruh petugas, saya amanatkan agar mewujudkan pelayanan yang terbaik. Jangan sampai ada masalah. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang telah terlibat dan mendukung terselenggaranya Immigration Lounge ini," pungkas Agus. ■

Sumber: Seksi Tikim Kantor Imigrasi Jakarta Selatan

Kanim Jakpus Goes to School: TINGKATKAN LITERASI KEIMIGRASIAN UNTUK GENERASI MUDA

Kanim Jakpus Goes to School diadakan di SMA Negeri 4 Jakarta sebagai salah satu upaya penyebaran literasi keimigrasian. Informasi mengenai paspor, visa, dan peran Imigrasi tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga bekal bagi generasi muda dalam studi, karier, dan perjalanan di masa depan.

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Non-TPI Jakarta Pusat menggelar program Kanim Jakpus Goes to School di SMA Negeri 4 Jakarta pada Rabu (14/8). Acara ini dihadiri oleh 45 siswa dan 5 tenaga pengajar.

Kanim Jakpus Goes to School menjadi bagian dari upaya Imigrasi untuk memberikan edukasi dan pemahaman keimigrasian pada era digital kepada generasi muda. Tujuannya adalah meningkatkan literasi keimigrasian di kalangan kaum muda Indonesia. Materi dalam program ini disampaikan secara interaktif oleh tim Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Pusat Bismo Surono mengatakan bahwa program ini bertujuan membekali

pelajar dengan pengetahuan seputar paspor, visa, dan peran Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara. "Melalui kegiatan Kanim Jakpus Goes To School, kami ingin memastikan generasi muda memahami prosedur, aturan, dan manfaat layanan keimigrasian secara benar. Kami berharap pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi bekal berharga bagi para siswa di masa depan," ujarnya.

Di tengah arus globalisasi yang makin pesat, pemahaman generasi muda mengenai keimigrasian menjadi makin krusial. Pemahaman mendalam tentang peraturan, prosedur, dan isu-isu keimigrasian tidak hanya membuka peluang mobilitas global untuk studi atau karier, tetapi juga sebagai bekal untuk merencanakan perjalanan dengan matang serta menghindari risiko penipuan.

Hal tersebut sejalan dengan Kepala SMA Negeri 4 Jakarta Achmad Subekti yang mengatakan, "Pengetahuan



Pemberian cendera mata kepada Kepala SMAN 4 Jakarta (Sumber: sudutpandang.id)

tentang keimigrasian tidak hanya penting bagi siswa yang akan bepergian ke luar negeri, tetapi juga sebagai bekal apabila nanti anak-anak ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri."

Selain itu, literasi keimigrasian juga membentuk generasi muda menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajibannya saat berada di luar negeri. Literasi ini menjadi kunci bagi generasi muda untuk meraih kesuksesan di kancah internasional sekaligus menjaga keamanan dan stabilitas di dalam negeri.

Melalui program ini, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat juga berharap agar para pelajar tidak hanya memahami fungsi dan peran Imigrasi, tetapi juga menjadi agen informasi yang menyebarkan pengetahuan tersebut kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

Penyelenggaraan Kanim Jakpus Goes to School tidak hanya mendapatkan apresiasi dari Achmad Subekti, tetapi juga para peserta yang tampak antusias untuk bertanya serta berpartisipasi dalam diskusi. Aulia, salah satu siswa yang hadir, mengaku mendapatkan wawasan baru. "Saya jadi tahu kalau paspor punya masa berlaku tertentu dan harus diperpanjang sebelum habis. Penjelasannya mudah dimengerti dan membuat saya tertarik untuk belajar lebih banyak tentang imigrasi," ujarnya. ■

Sumber: Seksi Tikim Kantor Imigrasi Jakarta Selatan

Kanim Jakpus Goes to School di SMA Negeri 4 Jakarta (Sumber: sudutpandang.id)

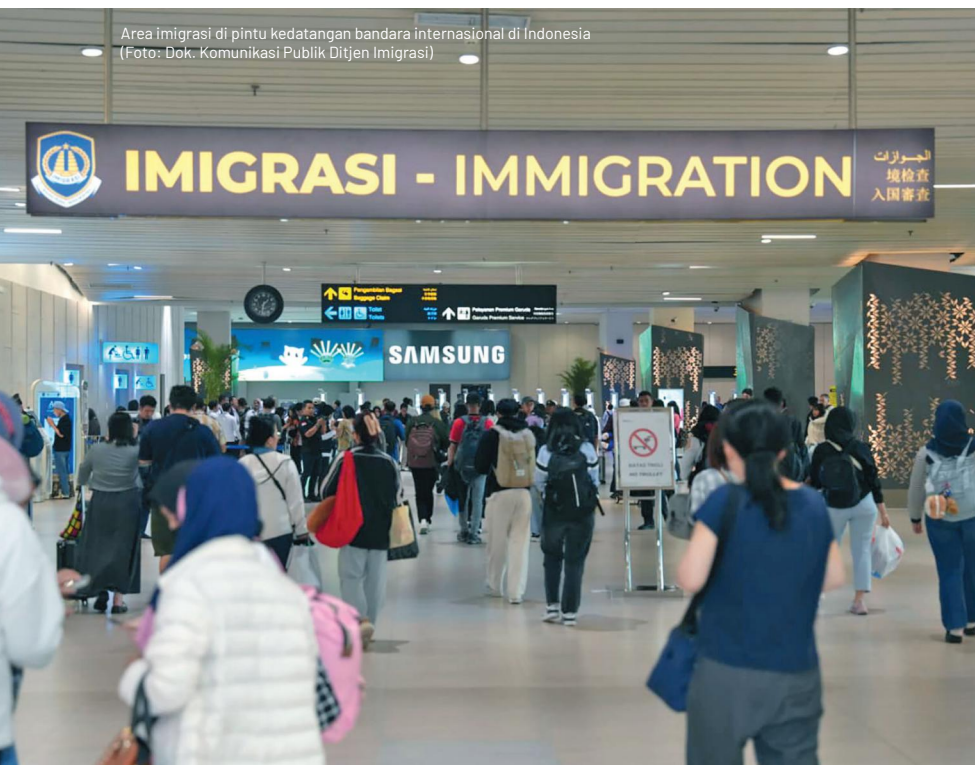


Aplikasi All Indonesia: **DEKLARASI KEDATANGAN DALAM SATU SISTEM DIGITAL**

Empat formulir bea cukai, imigrasi, kesehatan, dan karantina kini terintegrasi secara digital. Isi deklarasi kedatangan penumpang lebih cepat dan mudah dengan aplikasi All Indonesia.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Area Imigrasi di pintu kedatangan bandara internasional di Indonesia
(Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)



Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan aplikasi All Indonesia, sebuah platform digital terpadu yang dirancang untuk menyederhanakan proses deklarasi kedatangan bagi penumpang internasional. Mulai Senin, 1 September 2025, pengisian deklarasi kedatangan di beberapa pintu masuk utama Indonesia—termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta

(Tangerang), Bandara Internasional Juanda (Surabaya), Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (Bali), serta pelabuhan internasional di Batam—akan diwajibkan melalui aplikasi ini.

Tak hanya itu, aplikasi ini juga sedang dalam masa uji coba dan akan diperluas ke seluruh bandara, pelabuhan, serta pos perbatasan internasional di Indonesia.

All Indonesia mengintegrasikan berbagai formulir kedatangan yang meliputi bea cukai, imigrasi, kesehatan, dan karantina ke dalam satu sistem digital. Inisiatif ini bertujuan memberikan pengalaman perjalanan yang lebih cepat, mudah, dan aman bagi seluruh pendatang. Penumpang dapat mengisi deklarasi ini secara gratis sejak tiga hari sebelum keberangkatan atau saat tiba di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa aplikasi ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien. “All Indonesia tidak hanya mempersingkat waktu kedatangan, tetapi juga memastikan prosesnya ramah bagi semua penumpang, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak, baik individu maupun rombongan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Dirjen Bea dan Cukai Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama menegaskan komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendukung inisiatif ini. “Terobosan ini sangat penting untuk menciptakan layanan publik yang lebih lancar, tidak hanya untuk pergerakan orang, tetapi juga arus barang,” kata Djaka.

Integrasi digital ini menghilangkan kebutuhan untuk mengisi formulir terpisah seperti *electronic customs declaration* (e-CD) yang sebelumnya diwajibkan. Selain itu, aplikasi ini juga memfasilitasi pelaporan deklarasi kesehatan untuk mendeteksi potensi penyakit menular serta pemeriksaan karantina bagi penumpang yang membawa komoditas hewan, ikan, atau tumbuhan. Langkah ini merupakan bagian dari sistem kewaspadaan dini nasional untuk menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi ketahanan pangan serta ekonomi.

Untuk kemudahan akses, penumpang dapat mengisi formulir deklarasi melalui situs resmi allindonesia.imigrasi.go.id atau mengunduh aplikasi di Google Play Store dan App Store.

“Kami mengimbuai seluruh penumpang internasional, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), untuk memanfaatkan aplikasi ini,” imbuh Yuldi Yusman. “Setiap data yang Anda berikan adalah kunci untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan integritas perbatasan negara kita.” ■

MODUS BARU PENIPUAN DARING MENGATASNAMAKAN INSTANSI PEMERINTAH: Bagaimana Mencegahnya?

Situs web palsu kini tak hanya meniru toko daring, tetapi juga mengatasnamakan instansi pemerintah, seperti kantor imigrasi. Pelajari lima langkah praktis untuk memastikan keamanan setiap situs web yang Anda kunjungi.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Dewasa ini, kejahatan siber makin marak. Penipu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membuat situs web palsu yang sulit dibedakan dari aslinya. Mari kenali modus dan cara kerja para penipu agar terhindar dari penipuan.

Para penipu siber sering menggunakan beberapa modus untuk menjebak korbannya. Modus-modus tersebut, antara lain:

- **website phishing:** dirancang mirip dengan situs web asli untuk mencuri data pribadi, nama pengguna, dan kata sandi;
- **toko daring palsu:** menawarkan produk dengan harga sangat murah. Setelah korban membayar, barang tidak pernah dikirim dan situs web menghilang;
- **investasi dan hadiah palsu:** menjanjikan keuntungan besar atau hadiah fantastis. Modus ini biasanya meminta data pribadi atau biaya tertentu sebelum uang korban dibawa kabur;
- **situs unduhan palsu:** menyediakan tautan unduhan yang ternyata berisi *malware* atau virus yang dapat merusak perangkat dan mencuri data Anda.

Situs Web Palsu Mengatasnamakan Instansi Pemerintah

Modus penipuan ini juga menyasar instansi pemerintah. Kantor Imigrasi Pamekasan, Jawa Timur, baru-baru ini menemukan sejumlah situs web palsu yang mengatasnamakan mereka.

Ada tiga situs web yang mengatasnamakan Kantor Imigrasi Pamekasan, yaitu *imigrasisumenep.com*, *imigrasisampang.com*, dan *imigrasibangkalan.id*. Sementara itu, situs web resmi Kantor Imigrasi

yang ada di Pamekasan adalah *pamekasan.imigrasi.go.id* yang menggunakan domain khusus untuk instansi pemerintahan, *.go.id*. Domain lain seperti *.com* atau *.id* biasanya digunakan untuk keperluan komersial.

Tidak hanya Pamekasan, Kantor Imigrasi Bagansiapi-api juga dicatut namanya. Alamat resmi mereka *kanimbagansiapiapi.kemenumham.go.id* dipalsukan menjadi situs judi daring dengan alamat *bagansiapi-api.id*.

Terkait modus penipuan yang kerap mencatat nama instansi pemerintahan, Koordinator Fungsi Komunikasi Publik Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Achmad Nur Saleh berpesan agar publik lebih berhati-hati.

"Kami minta masyarakat agar lebih berhati-hati. Jika ada identitas kantor imigrasi yang meragukan, silakan kontak Ditjen Imigrasi," kata Saleh.

Tip Mengecek Keaslian Situs Web

Untuk melindungi diri dari penipuan daring, ikuti panduan praktis berikut.

1. Waspada terhadap Penawaran yang Tidak Realistis

Jika ada diskon, hadiah, atau investasi yang terlihat terlalu menarik, itu patut dicurigai. Bandingkan harga atau informasi di situs web resmi untuk memastikan kebenarannya.

2. Manfaatkan Mesin Pencari

Ketik nama situs web yang Anda curigai di mesin pencari dan tambahkan kata kunci seperti "penipu", "scam", atau "ulasan". Anda bisa menemukan testimoni atau peringatan dari pengguna lain yang pernah menjadi korban.

3. Periksa Sertifikat SSL

Situs web yang aman ditandai dengan ikon gembok dan URL yang dimulai dengan *https://*. Pastikan sertifikat SSL tersebut valid. Namun, tetaplah berhati-hati karena beberapa penipu juga menggunakan sertifikat SSL.

4. Teliti Alamat URL

Penipu sering membuat URL yang sangat mirip dengan aslinya. Selalu periksa kembali alamat situs web dengan teliti.

5. Gunakan Alat Verifikasi Daring

Gunakan alat verifikasi daring gratis seperti Google Transparency Report atau Norton Safe Web. Alat ini dapat membantu Anda memeriksa reputasi dan keamanan sebuah situs web.

Dengan bersikap lebih waspada dan cermat, Anda bisa melindungi diri dari ancaman penipuan daring. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming yang tidak masuk akal dan selalu pastikan keaslian situs web sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi. ■

Penipuan melalui situs web (ilustrasi) (Sumber: howtogeek.com)





(Sumber: freepik.com)

BEKERJA DALAM KONTEKS KEIMIGRASIAN

Statistik keimigrasian menunjukkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA di perusahaan menjadi pelanggaran tertinggi sepanjang 2025. Ironisnya, kasus bermula dari ketidakpahaman mengenai tiga indikator bekerja.

■ Penulis: Junaidul Fitriyono

Pelaksanaan tugas keimigrasian memiliki keterkaitan dengan berbagai isu di bidang ketenagakerjaan. Tidak hanya dalam konteks penerbitan paspor bagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan bekerja ke luar negeri, tetapi juga dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing (WNA), yang sering berkaitan dengan dokumen dan aktivitas ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, petugas imigrasi harus memahami definisi dan konsepsi

bekerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan penegakan peraturan ketenagakerjaan serta pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dokumen.

Definisi "bekerja" terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Bekerja" atau "ketenagakerjaan" didefinisikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Secara spesifik, definisi bekerja atau

ketenagakerjaan dalam peraturan tersebut adalah 'setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat'. Namun, definisi ini perlu diperluas cakupannya, khususnya dalam konteks keimigrasian.

Muryanto, pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, mendefinisikan bekerja bagi seorang tenaga kerja paling tidak harus memenuhi tiga perspektif, yakni menduduki jabatan, menerima



penghasilan atau memperoleh keuntungan, dan mendapatkan perintah atau memiliki kewenangan untuk memerintah. Seseorang dianggap bekerja jika telah memenuhi ketiga perspektif tersebut.

Perspektif Jabatan

Jabatan menunjukkan posisi seseorang dalam hierarki pekerjaannya. Dalam praktiknya, kita memahami bahwa jabatan menunjukkan sejauh mana kewenangan dimiliki oleh seseorang dalam pengelolaan perusahaan. Sudut pandang lain menyatakan bahwa terdapat dua jenis jabatan dalam perusahaan, yakni jabatan manajerial dan jabatan investatif.

Jabatan manajerial berkaitan dengan posisinya dalam pengelolaan perusahaan. Pejabat manajerial bertanggung jawab dalam pencapaian target. Jabatan ini berhubungan dengan produktivitas dan kinerja perusahaan. Dalam perspektif keimigrasian, jabatan manajerial yang berkaitan dengan WNA adalah jabatan-jabatan yang diberikan kepada tenaga kerja asing

DALAM MENJALANKAN TUGAS PENGAWASAN, PETUGAS IMIGRASI HARUS MEMAHAMI DEFINISI DAN KONSEPSI BEKERJA.

(TKA), baik sebagai pemimpin tertinggi perusahaan, seperti direktur, maupun jabatan teknis, seperti manajer atau kepala produksi.

Sementara itu, jabatan investatif berkaitan dengan jumlah modal atau kepemilikan saham. Jabatan investatif dapat juga berperan dalam jabatan manajerial. Seorang investor dapat menduduki jabatan direktur di dalam perusahaan yang sama. Fleksibilitas yang dimiliki pemegang jabatan investatif memungkinkan dirinya bertindak baik sebagai investor maupun pemimpin tertinggi perusahaan. Dalam sudut pandang keimigrasian, WNA dapat menduduki posisi sebagai investor dengan izin tinggal sebagai investor. Namun, WNA juga dapat merangkap dengan jabatan lainnya selama landasan ketenagakerjaan dan keimigrasiannya terpenuhi.

WNA yang memiliki jabatan di perusahaan wajib memenuhi persyaratan ketenagakerjaan. Jabatan yang dimiliki oleh WNA dalam perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap jenis izin tinggal yang nantinya akan dimiliki. Selain itu, WNA yang bekerja di Indonesia dibatasi kewenangannya untuk menduduki jabatan dalam bidang tertentu, seperti pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

Perspektif Penghasilan

Salah satu tujuan bekerja adalah memperoleh upah atau gaji serta mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Bukti bekerja dapat ditunjukkan dengan adanya slip gaji atau laporan keuangan perusahaan.

Dalam konteks keimigrasian, petugas harus cermat menilai aktivitas WNA berdasarkan perspektif ini. Seseorang yang menerima gaji atas pekerjaan yang dilakukan atau mengoperasikan perusahaan dalam rangka

pemerolehan keuntungan, dapat masuk ke dalam kategori bekerja. Namun, petugas harus bisa memahami secara utuh jika sistem pekerjaannya tidak selalu dalam bentuk tertulis, misalnya hanya berupa komitmen di antara para pihak. Petugas harus mampu memverifikasi bukti penerimaan gaji atau keuntungan WNA, termasuk dalam sistem kerja nonformal.

Perspektif Kewenangan

Kewenangan seseorang untuk mendapatkan perintah atau dalam memberi perintah menunjukkan adanya hubungan antarunit atau antarindividu dalam perusahaan. Hubungan tersebut berupa garis komando atau garis koordinasi. Garis komando menunjukkan hubungan antara atasan dan bawahan, antara pemberi dan penerima perintah. Garis komando sering kali menggambarkan hierarki atau tingkatan kewenangan yang berbeda.

Sementara itu, garis koordinasi biasanya berupa hubungan kerja sama antarunit atau antarindividu dalam perusahaan. Garis koordinasi bersifat kolaboratif meski kewenangannya tidak selalu setara.

Dalam perspektif keimigrasian, seorang WNA yang memiliki sebuah kewenangan untuk memberi perintah ataupun untuk menjalankan perintah dari jabatan lain menunjukkan aktivitas bekerja. Instruksi yang diberikan oleh seorang WNA dalam proses pengelolaan perusahaan akan menunjukkan kewenangan yang dimilikinya dalam perusahaan.

Realitas di Lapangan

Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, sampai dengan pertengahan 2025 ini, penyalahgunaan izin tinggal menduduki peringkat tertinggi dalam penegakan hukum keimigrasian. Penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh WNA yang beraktivitas di perusahaan menjadi salah satu penyumbang tingginya jumlah WNA yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) atau tindakan *pro justitia*.

Kini, banyak istilah teknis seperti “pembicaraan bisnis” atau “kebijakan purnajual” yang harus dipahami untuk menghindari penyalahgunaan izin tinggal. Petugas imigrasi harus selalu meningkatkan pemahamannya untuk memperkuat kecermatan dalam pelaksanaan tugas. ■

KECERDASAN BUATAN DAN KOMPAS MORAL BANGSA

Di balik efisiensi dan potensi kemajuan yang ditawarkan, AI berpotensi merusak tatanan sosial. Apakah kemajuan teknologi ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan?

■ Penulis: Okky Putra Barus (Dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Pelita Harapan)

"**T** echnology is a useful servant but a dangerous master." Kutipan Christian Lous Lange, guru dan ilmuwan penerima Nobel Perdamaian tahun 1921, bergema sepanjang sejarah inovasi teknologi. Kutipan ini tetap relevan pada era akal imitasi (*artificial intelligence/AI*). AI yang sebelumnya hanya kajian akademis kini telah merambah ke berbagai sektor dan diadopsi di beragam situasi. Dari meningkatkan efisiensi operasional di berbagai industri hingga mempercepat penemuan ilmiah, AI menjanjikan efisiensi dan kemajuan yang belum pernah ada sebelumnya.

Namun, di balik peluang inovasi ini, tersembunyi dilema etika mendalam yang menuntut kita bertanya: Apakah kemajuan teknologi ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan? Bagi Indonesia, sebuah negara dengan keragaman budaya dan sosial yang kaya, pertanyaan ini bukan sekadar perdebatan filosofis, melainkan panggilan yang mendesak untuk menavigasi arus inovasi AI dengan kompas moral yang kuat demi membangun sebuah kedaulatan digital yang beretika dan bertanggung jawab.

Seperti Dua Sisi Mata Uang

Potensi AI untuk memajukan bangsa memang tidak terbantahkan. Secara global, AI telah merevolusi berbagai sektor, mulai dari kesehatan untuk diagnosis penyakit yang lebih cepat, keuangan untuk deteksi penipuan, hingga transportasi dengan pengembangan kendaraan otonom. Bahkan, di bidang imigrasi, teknologi pengenalan wajah (*face recognition*) telah membantu validasi wajah dan data paspor.

Namun, sekali lagi, seperti dua sisi mata uang, efisiensi dengan AI menyimpan "sisi gelap" yang

berpotensi merusak tatanan sosial jika tidak dikelola dengan bijak. Bias algoritmik menjadi salah satu ancaman besar. Sistem AI dapat memperkuat diskriminasi. Contohnya, algoritma rekrutmen Amazon pernah mendiskriminasi pelamar wanita. Sementara itu, studi "*Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*" oleh Joy Buolamwini (MIT Media Lab) dan Timnit Gebru (Microsoft Research) menunjukkan adanya bias rasial pada teknologi pengenalan wajah berbasis AI, seperti yang digunakan di Imigrasi.

Pelanggaran privasi juga menjadi momok saat terjadi kebocoran data, mengingat AI membutuhkan data sensitif dalam jumlah besar. Isu lain, seperti penyalahgunaan *deepfake* dan melemahnya kemampuan berpikir kritis para pelajar akibat ketergantungan pada penggunaan AI generatif (*generative AI*), juga patut diwaspadai. Jika risiko-risiko yang ada tidak ditangani, kepercayaan publik akan terkikis dan AI justru dapat memperlebar kesenjangan sosial.

Indonesia melalui berbagai inisiatif, seperti Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 dan Surat Edaran Menkominfo No. 9/2023, telah menunjukkan komitmen untuk mengatur AI. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga menjadi payung hukum penting untuk menjaga privasi individu. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan dan implementasi.

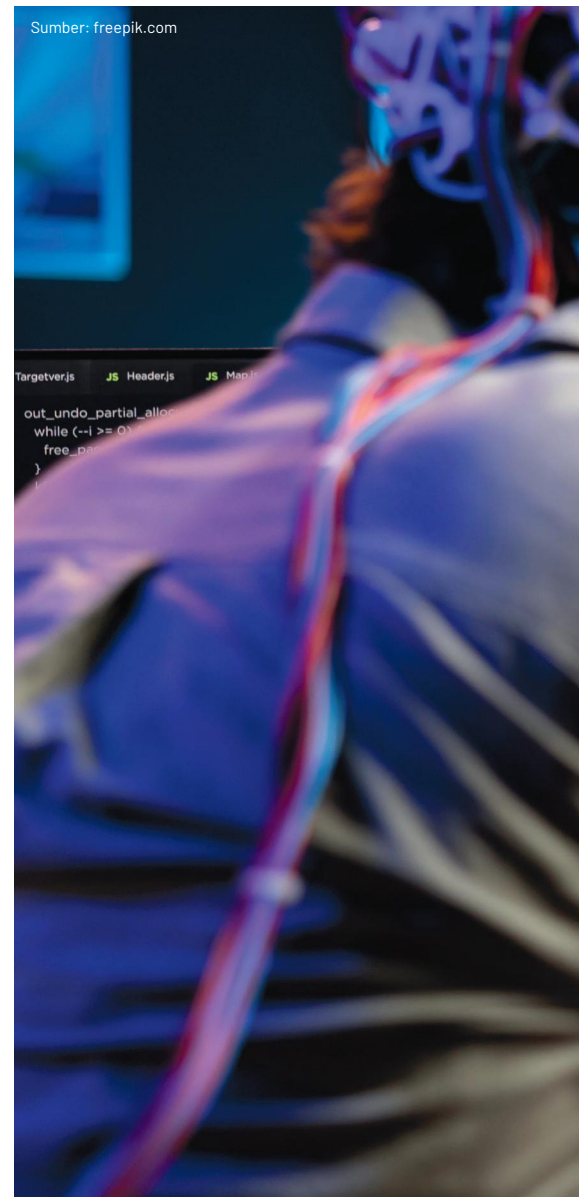
Implementasi etika AI di Indonesia masih tergolong lemah. Regulasi yang ada pun sering kali tertinggal dari laju perkembangan teknologi. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya akses ke data berkualitas, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang isu etika dan privasi AI.

Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi ini bukan hanya menghambat inovasi AI yang bertanggung jawab, melainkan juga meningkatkan risiko dampak negatif bagi masyarakat. Tanpa kerangka tata kelola yang adaptif dan penegakan yang kuat, potensi AI untuk diskriminasi, penyalahgunaan data, dan pergeseran pekerjaan yang tidak adil akan makin besar; mengancam keadilan sosial dan stabilitas ekonomi bangsa.

Tata Kelola yang Humanis

Untuk menyeimbangkan inovasi dan etika, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan tata kelola AI yang

Sumber: freepik.com



komprehensif dan berpusat pada manusia. *Pertama*, kolaborasi *multi-stakeholders* adalah kunci. Pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil harus duduk bersama merumuskan pedoman etika dan regulasi yang inklusif dan relevan. Penting untuk diingat bahwa tata kelola AI tidak bisa bersifat “satu ukuran untuk semua”. Setiap sektor (mulai dari pemerintahan, kesehatan, keuangan, pendidikan, dan sebagainya) membutuhkan kerangka etika dan regulasi yang adaptif dan spesifik sesuai dengan konteks, risiko, dan tujuan uniknya.

Kedua, perancangan AI harus berpusat pada manusia. Hal ini diperlukan guna memastikan bahwa teknologi dirancang untuk meningkatkan kemampuan manusia. Lebih dari sekadar *hype*, setiap implementasi AI harus secara jelas merumuskan nilai (*value*) yang akan didapatkan. Ini memastikan bahwa

teknologi ini benar-benar memberikan manfaat dan bukan hanya efisiensi yang semu.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pilar utama. Pengembangan Explainable AI (XAI) yang memungkinkan pengguna memahami bagaimana keputusan AI dibuat serta audit algoritmik secara berkala sangat krusial untuk membangun kepercayaan dan memastikan pertanggungjawaban.

Terakhir dan tidak kalah penting adalah edukasi dan literasi AI secara masif. Masyarakat harus dibekali pemahaman yang memadai tentang manfaat, risiko, dan pertimbangan etika AI. Kampanye di media sosial, seperti #BijakPakaiAI, perlu digalakkan untuk meningkatkan kesadaran serta memberdayakan setiap individu menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membentuk masa depan AI yang etis.

Masa depan AI di Indonesia tidak bisa hanya ditentukan oleh kecepatan inovasi, tetapi juga oleh kekuatan kompas moral kita. Keseimbangan antara inovasi dan etika bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis untuk memastikan bahwa AI menjadi sebuah kekuatan pendorong bagi kemajuan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan komitmen kuat dari seluruh elemen untuk menerapkan tata kelola yang adaptif, praktik pengembangan yang bertanggung jawab, dan literasi AI yang merata, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan AI yang beretika. Ini adalah jalan menuju kedaulatan digital sejati agar teknologi, khususnya AI, benar-benar menjadi “pelayan” yang berguna bagi kemanusiaan, bukan “tuan” yang berbahaya yang mengikis nilai-nilai fundamental bangsa dan keadilan sosial. ■



Love Scamming:

MENIPU ITU BUKAN TANDA CINTA

Di balik layar ponsel, romansa berbalut janji manis bisa berubah menjadi mimpi buruk. Dalam memerangi kejahatan *love scamming* ini, kesadaran dan kewaspadaan individual perlu ditumbuhkan. Imigrasi pun hadir untuk memberikan antisipasi dan edukasi.

■ Penulis: Ajeng Dhyanti Paramitha



Sumber: freepik.com

Mawar—nama samaran—adalah seorang wanita muda yang sedang mabuk asmara. Ia memiliki harapan besar untuk membangun hidup bersama pria asing yang baru dikenalnya beberapa bulan terakhir di media sosial. Baginya, Pakistan adalah negeri impian, tempatnya bermimpi memulai babak baru bersama kekasih yang selama ini hanya ia sapa melalui layar ponsel. Sayangnya, tanpa disadari, langkah yang ia ambil justru mengantarnya ke jurang *love scamming*, sebuah penipuan dalam jaringan (daring) atau *online* yang memanfaatkan hubungan romantis untuk menguras harta dan data pribadi korbannya.

Dengan intuisi yang terasah, petugas imigrasi berhasil membaca gelagat mencurigakan Mawar saat ia berada di balik konter layanan paspor. Gelagat ini terbaca ketika Mawar menceritakan alasannya untuk mengurus paspor.

“Mau ke Pakistan, bertemu calon suami,” tutur Mawar. Ia menjelaskan bahwa mereka berkenalan di media sosial dan sama sekali belum pernah bertatap muka. Hasil pendalaman wawancara mengungkap fakta yang lebih mencemaskan: rencana kepergiannya tidak diketahui orang tuanya, dan ia bahkan telah mentransfer sejumlah uang kepada pria tersebut. Fakta-fakta ini kian mengukuhkan kecurigaan petugas bahwa Mawar adalah korban *love scamming*, salah satu modus kejahatan yang kerap dilakukan warga negara asing (WNA).

Kasus Mawar hanyalah satu dari banyak kasus serupa di Indonesia. Dalam konteks ini, peran Imigrasi tidak sekadar menjadi pengawas lalu lintas orang, tetapi juga menjadi garda terdepan penjagaan keamanan warga negara dari kejahatan lintas negara yang berkedok percintaan dunia maya. Kewaspadaan petugas imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan berhasil menggagalkan upaya penipuan yang menargetkan Mawar tepat pada saat proses pengajuan paspor.

Tugas petugas imigrasi dalam menangani kasus semacam ini tidak hanya berhenti pada penolakan permohonan paspor, tetapi juga mencakup aspek edukasi. Penting bagi petugas untuk menjelaskan segala risiko yang dapat dialami korban *love scamming* di negara tujuan, yang tidak hanya mencakup kerugian finansial,

tetapi juga ancaman terhadap kebebasan dan keselamatan pribadi. Korban berisiko tinggi ditelantarkan atau menjadi korban perdagangan orang. Dengan demikian, keputusan menolak paspor bukanlah upaya menghalangi, melainkan merupakan langkah preventif untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) dari kejahatan lintas negara.

Ada Sejak Lama

Lantas, apa itu *love scamming*? Secara sederhana, *love scamming* adalah penipuan daring yang memanfaatkan hubungan asmara palsu. Modusnya dimulai ketika pelaku membuat identitas palsu di media sosial untuk menjalin hubungan romantis yang fiktif dengan korbannya. Melalui perhatian intens, kata-kata manis, serta janji cinta dan komitmen, korban perlahan dibujuk untuk memercayai pelaku sepenuhnya. Begitu ikatan emosional terbentuk, pelaku mulai meminta bantuan keuangan dengan berbagai dalih darurat, seperti biaya pengobatan atau tiket perjalanan, sebelum akhirnya menghilang setelah uang berhasil didapat. Fenomena ini kerap menasar individu yang kesepian atau haus perhatian karena mereka lebih rentan terikat secara emosional dan sulit menyadari bahwa diri mereka sedang dimanipulasi.

Love scamming bukanlah hal baru. Modus ini sudah ada sejak abad ke-16, jauh sebelum internet lahir, dengan nama *Spanish Prisoner scam*. Pada zaman itu, pelaku berkedok bangsawan Spanyol kaya yang mengaku sedang ditahan dan memiliki harta karun serta seorang putri yang perlu diselamatkan. Korban diiming-imingi bagian dari harta dan juga kesempatan menikahi sang putri sebagai imbalan atas uang bantuan. Penipuan ini sulit diberantas karena melibatkan yurisdiksi dua negara yang menyulitkan kerja sama aparat hukum.

Meski metodenya telah berevolusi dari surat-menyurat ke media digital, inti penipuan ini tetap sama: memanfaatkan emosi, harapan, dan rasa cinta korban untuk keuntungan pelaku.

Modus dan Dampak Psikologis

Dari kacamata psikologi, *love scamming* terjadi dengan memanipulasi tahapan perkembangan hubungan interpersonal yang sering digambarkan seperti lapisan bawang. Berlandaskan salah satu teori komunikasi bernama teori

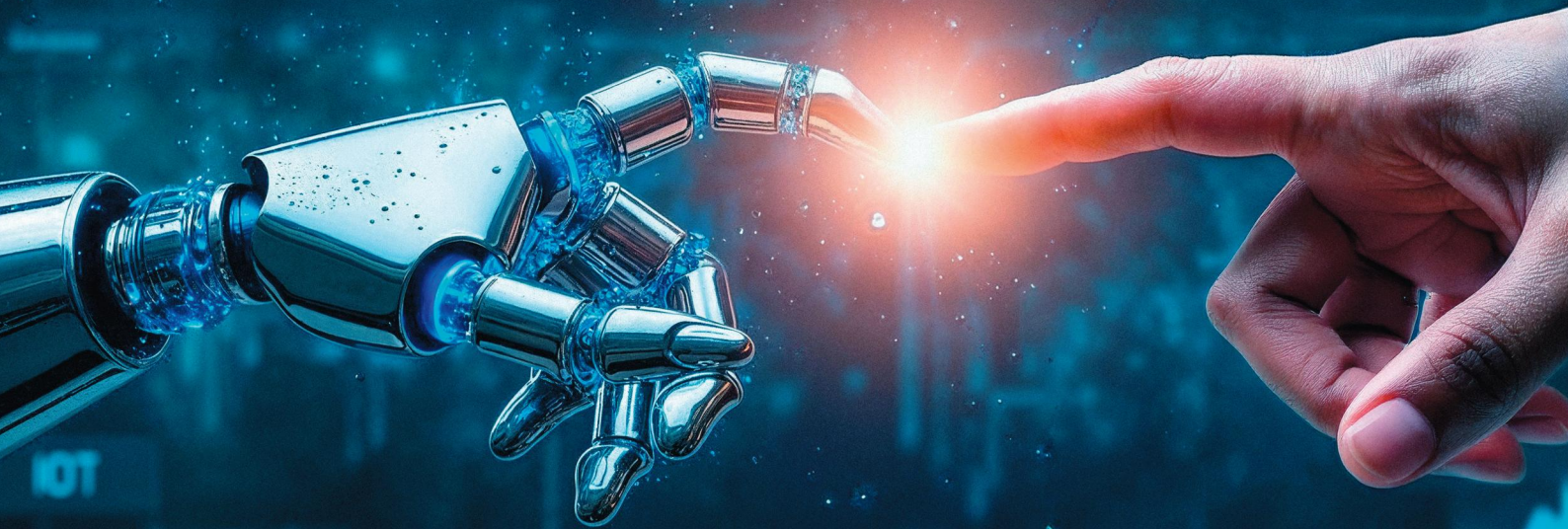
penetrasi sosial, penipu memulai dengan membangun kedekatan awal menggunakan identitas palsu melalui obrolan ringan di media sosial untuk menciptakan keakraban. Tahap selanjutnya adalah membuka diri, yaitu ketika pelaku berpura-pura berbagi cerita pribadi untuk memancing korban agar terbuka dan secara bersamaan mengumpulkan informasi finansial serta emosionalnya. Proses ini kemudian masuk ke fase penetrasi, ditandai dengan komunikasi intensif yang dijaga selama berbulan-bulan (6–8 bulan) hingga terbentuk ikatan emosional yang kuat. Ironisnya, kedekatan digital ini sering kali terasa lebih intim daripada interaksi langsung—sebuah fenomena yang disebut komunikasi hiperpersonal.

Fase terakhir adalah depenetrasi yang terjadi ketika hubungan mulai memudar akibat kegagalan penipu meyakinkan korban atau karena korban mulai menyadari penipuan tersebut. Pada intinya, penipu mengambil alih dan memelintir proses alami terbangunnya keintiman, mengubah sesuatu yang seharusnya berujung pada cinta menjadi sebuah mesin kejahatan.

Dampak *love scamming* melampaui sekadar kerugian materiel. Korban juga mengalami trauma psikologis yang berat, seperti terkikisnya rasa percaya diri dan hancurnya kepercayaan terhadap orang lain. Rasa malu karena dianggap naif, takut dicemooh, dan beban stigma masyarakat—yang kerap menyalahkan korban (*victim blaming*), terutama perempuan—membuat mereka sering memilih untuk diam. Kesunyian ini justru memperparah luka mereka dan menciptakan siklus yang membuat modus kejahatan ini terus berulang tanpa penyelesaian.

Oleh karena itu, langkah pencegahan secara individual menjadi krusial. Setiap orang perlu meningkatkan literasi digital, senantiasa bersikap kritis, dan tidak mudah memercayai orang asing yang baru dikenal di dunia maya.

Kisah Mawar membuktikan bahwa cinta yang maya berpotensi berubah menjadi jebakan yang membahayakan jiwa dan raga. Di tingkat yang lebih luas, peran institusi seperti Imigrasi sangat vital. Imigrasi tidak hanya menjadi garda terdepan dalam pengawasan lalu lintas orang, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung warga negara Indonesia (WNI) dari ancaman kejahatan lintas negara yang terselelubung dalam rayuan. ■



Ketika AI Makin Cerdas, **APAKAH KITA KIAN LUPA MENJADI MANUSIA?**

Perkembangan AI patut diiringi dengan refleksi para pencipta dan penggunaannya sebagai manusia. Dengan begitu, teknologi ini dapat berkembang sejalan dengan nurani, bukan menggantikannya.

■ Penulis: Endang Megawati (Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro)

Hari ini, mesin bisa “memprediksi” masa depan, melukis wajah kita, bahkan menebak isi hati lewat algoritma. Pada saat yang sama, ketika tetangga sebelah rumah membutuhkan sepiring nasi, kita justru sibuk sendiri tanpa melihat

sekitar. Di antara deretan notifikasi dan kecanggihan prediksi akal imitasi (*artificial intelligence/AI*), kita perlahan kehilangan sesuatu yang paling mendasar, yaitu empati.

AI kini berada dalam fase pertumbuhan tercepatnya. Kita dibuat terpujau oleh kemampuannya menulis

artikel, berpikir strategis, bahkan merespons obrolan seperti manusia. Ia mampu menuliskan naskah pidato dalam hitungan detik, menyusun laporan keuangan nyaris tanpa cela, bahkan menciptakan wajah orang yang tak pernah ada. Namun, di balik kemegahan teknologi ini, ada satu



(Sumber: freepik.com)

TANTANGAN FUNDAMENTALNYA ADALAH ETIKA BUKAN FITUR YANG BISA DIUNDUH.

pertanyaan sunyi yang jarang diajukan: Apakah kita sudah siap secara etika?

Selama ini, perdebatan soal AI sering terjebak pada isu efisiensi. Seberapa cepat ia menggantikan tenaga manusia? Berapa banyak biaya yang bisa dihemat? Namun, sedikit sekali yang mau jujur mengakui bahwa kita belum cukup matang secara moral untuk hidup berdampingan dengan entitas digital yang sedemikian cerdas. Kita terlalu sibuk membentuk otak AI, tetapi lalai menumbuhkan nurani kita sendiri.

AI kini bisa menyaring kandidat kerja lebih cepat daripada Human

Resource Development (HRD) perusahaan. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah sistem itu menyimpan bias? Jika data pelatihan AI bersifat diskriminatif, misalnya merugikan perempuan, kelompok etnis tertentu, atau disabilitas, hasil keputusannya pun ikut cacat. Di dunia kesehatan, AI dapat memprediksi potensi penyakit sebelum gejalanya muncul. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa data pasien tidak disalahgunakan? AI tidak memahami arti privasi, apalagi rasa bersalah jika data itu tersebar. Berbeda dengan manusia, AI tak bisa meminta maaf.

Tantangan fundamentalnya adalah etika bukan fitur yang bisa diunduh. Ia bukan sekadar kebijakan privasi atau pengaturan keamanan. Etika adalah kesadaran, konteks, dan empati, tiga hal yang hingga kini belum dapat dikodekan dalam bahasa mesin. Keputusan etis membutuhkan lebih dari logika—ia butuh hati. Di sinilah letak perbedaan utama antara manusia dan algoritma.

Ironisnya, dalam berbagai praktik, kitalah yang justru mulai kehilangan hati itu. Kita terlalu bergantung pada teknologi untuk mengambil keputusan penting. Kita berharap AI bersikap netral, padahal kita sendiri penuh prasangka. Kita ingin AI bersikap ramah, tetapi kita justru makin asing dari satu sama lain. Makin canggih AI, makin kuat kecenderungan kita untuk menyederhanakan dunia menjadi angka dan data. Padahal, realitas manusia terlalu kompleks untuk diringkas dalam statistik.

AI tidak salah. Ia hanya secerdas dan sebijak pembuatnya. Jika manusia yang menciptakan AI gagal menyuntikkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam proses desain dan implementasinya, AI hanya akan mereproduksi ketimpangan sosial yang telah lama ada: ketidaksetaraan, bias, dan eksklusi. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan AI bukan sebagai pengganti manusia, melainkan alat bantu yang wajib diawasi secara etis, legal, dan bermoral.

Tanggung jawab ini tidak hanya milik para insinyur teknologi atau pembuat kebijakan. Pengguna media sosial yang memakai filter wajah, guru yang memakai AI untuk menyusun materi belajar, birokrat yang memanfaatkan bot obrolan (*chatbot*) untuk pelayanan publik, hingga kita yang menggunakan AI sebagai teman

curhat, semuanya punya peran. Kita semua memegang kendali atas bagaimana AI berkembang dan digunakan.

Di dunia pendidikan, penggunaan AI secara tidak sadar mulai menggantikan proses berpikir reflektif. Mahasiswa menulis esai dengan bantuan mesin; siswa mengerjakan soal tanpa memahami konsepnya. Jika dibiarkan, generasi mendatang mungkin akan pandai secara teknis, tetapi miskin dalam kebijaksanaan. Pendidikan etika digital harus segera masuk ke dalam kurikulum bukan sebagai tambahan, melainkan fondasi berpikir kritis dan karakter moral. Kita perlu menumbuhkan bukan hanya literasi digital, melainkan juga literasi etis dan emosional. Generasi masa depan perlu dibekali tidak hanya dengan keterampilan teknis, tetapi juga keberanian untuk peduli dan bertindak benar di tengah ambiguitas moral dunia digital.

Tantangan sesungguhnya bukan pada kecerdasan mesin, melainkan kebijaksanaan manusia. Makin canggih teknologi, makin besar kebutuhan akan arah moral yang kuat. Kita tidak butuh manusia yang kalah cepat dari mesin. Kita butuh manusia yang mampu membimbing mesin untuk tetap berpihak pada kemanusiaan. Ini hanya bisa terwujud jika kita sadar bahwa perkembangan teknologi seharusnya berjalan seiring dengan pertumbuhan batin kita sebagai manusia.

Teknologi tidak pernah netral. Ia mencerminkan nilai, asumsi, dan kepentingan dari pencipta serta penggunaannya. Jika AI hari ini terasa impersonal dan "dingin", barangkali karena kita sendiri sudah terlalu lama berhenti menyentuh dunia dengan empati. Jika AI terasa mengancam, mungkin karena kita sudah lama tidak berdialog tentang etika dan kemanusiaan. Kita membangun mesin yang kuat, tetapi lupa membangun manusia yang bijak dan lembut.

AI akan terus berkembang. Seharusnya, begitu juga dengan kita. Bukan dalam hal algoritma, melainkan keberanian untuk berpikir kritis, kepekaan terhadap sesama, dan komitmen menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Tugas kita bukan melawan kemajuan, melainkan memastikan bahwa kemajuan tidak membawa kita menjauh dari nurani. Karena pada akhirnya, manusia tidak hanya soal otak, tetapi juga hati. ■

Melestarikan Kebaya, **MERAWAT JATI DIRI BANGSA**

Kebaya bukan hanya warisan masa lalu, melainkan juga bagian dari identitas masa kini. Di tengah perubahan mode yang begitu cepat, kebaya lestari bersama gerakan para perempuan.

■ Penulis: Roro Aditya Citraningtyas Ningrum



Film pendek #KitaBerkebaya
(Sumber: [instagram.com/andlen](https://www.instagram.com/andlen))

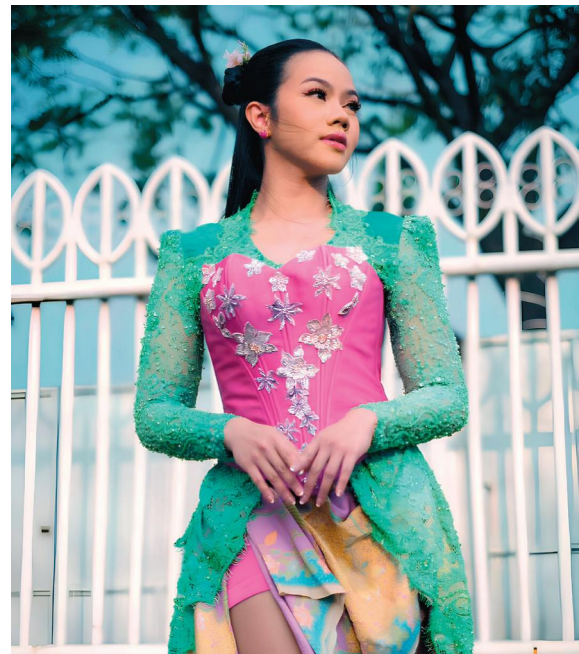
"Kebaya itu tidak hanya hidup, tetapi juga menghidupi." Kalimat ini diucapkan oleh Renitasari Adrian, seorang direktur program sebuah yayasan yang berkomitmen untuk melestarikan budaya Indonesia, pada momen Hari Kebaya Nasional yang digelar pada Kamis (24/7) lalu di Posco, Bandung. Ucapan ini bukan sekadar metafora, melainkan sebuah pernyataan yang merangkum esensi dari sebuah gerakan yang kini sedang bergelora di seluruh penjuru negeri: Indonesia Berkebaya. Lebih dari sekadar selembar kain yang dijahit menjadi busana, kebaya adalah benang merah yang mengikat sejarah, identitas, dan masa depan perempuan Indonesia.

Napas Panjang dari Masa Lalu

Sebelum ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya takbenda pada 4 Desember 2024, kebaya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi bangsa ini. Jejaknya bisa dilacak dari abad ke-15 atau ke-16 ketika ia mulai muncul sebagai hasil akulturasi budaya Arab, Tiongkok, dan Portugis. Nama "kebaya" sendiri berasal dari kata Arab, *kaba* atau *qaba*, yang berarti 'jubah' atau 'pakaian', sebelum kemudian diserap ke dalam bahasa Portugis menjadi *cabaya*.

Pada mulanya, kebaya adalah simbol status sosial, busana yang hanya dikenakan oleh kalangan

Yura Yunita dalam balutan kebaya yang dipadukan dengan wastra Indonesia (Sumber: [instagram.com/yurayunita](https://www.instagram.com/yurayunita))



bangsawan dan perempuan terpendang. Namun, seiring waktu, kebaya mengalami demokratisasi. Ia melampaui batas-batas kelas dan menjadi busana nasional yang dapat dikenakan oleh siapa saja. Kebaya merefleksikan nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun—kelembutan, keanggunan, dan keteguhan hati perempuan Indonesia.

Namun, di balik keindahan dan keanggunannya, kebaya juga menjadi saksi bisu perjuangan. Tak hanya menjadi pakaian, kebaya juga menjadi simbol perjuangan emansipasi. Momen paling bersejarah adalah pada saat kebaya dikenakan oleh para peserta Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928, yang menjadi simbol nyata dari semangat perempuan yang berani menuntut hak-haknya. Dengan kebaya, mereka membuktikan bahwa perempuan Indonesia mampu berdiri sejajar, mengambil peran, dan memimpin perubahan.

Menghadapi Laju Waktu dan Tren

Pada era digital ketika tren mode global datang silih berganti, kebaya seakan terpinggirkan. Banyak generasi muda menganggap kebaya sebagai busana yang kuno, tidak praktis, dan membatasi gerak. Mereka lebih memilih gaya berpakaian yang lebih modern dan kasual dan melupakan nilai-nilai sejarah dan filosofi yang terkandung dalam selembar kain tersebut.

Melihat fenomena ini, muncullah sebuah kesadaran kolektif: Kebaya tidak boleh mati. Ia harus terus bernapas, bertransformasi, dan beradaptasi agar tetap relevan. Kesadaran inilah yang kemudian memicu lahirnya gerakan-gerakan kolektif untuk melestarikan kebaya, salah satunya adalah Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia (KPB). Gerakan ini bukan sekadar inisiatif, melainkan sebuah bentuk solidaritas para perempuan yang ingin mengajak semua orang untuk kembali merayakan kebaya.

Gerakan Indonesia Berkebaya tidak datang dengan membawa pakem yang kaku. Justru sebaliknya, ia datang dengan semangat yang inklusif dan ajakan untuk berkreasi. Para desainer mode kini berinovasi, memadukan kebaya dengan sentuhan kontemporer dan menjadikannya lebih ringan, modern, dan fleksibel untuk dikenakan dalam berbagai kesempatan. Kebaya kini bisa dipadukan dengan kain

songket, tenun, atau jarik, menciptakan gaya yang segar dan tidak membosankan. Gerakan ini membuktikan bahwa kebaya bukan hanya dapat dikenakan pada acara formal, melainkan juga menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari—saat ke kantor, berbelanja, atau sekadar berkumpul bersama teman.

Kelestarian dari Kolaborasi

Pelestarian kebaya adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dengan menetapkan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2023. Penetapan ini menjadi momen penting untuk merayakan kebaya dan mengukuhkan posisinya sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Tak hanya itu, beberapa pemerintah daerah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong penggunaan kebaya di kalangan pegawai perempuan, sebuah langkah nyata untuk menghidupkan kembali tradisi ini.

Sektor swasta juga tak ketinggalan mengambil peran. Sebagai contoh, Hari Kebaya Nasional tahun 2025 dirayakan melalui film pendek berjudul *#KitaBerkebaya*, buah karya Bakti Budaya Djarum Foundation dan Indonesia Kaya melalui kanal YouTube Indonesia Kaya. Film ini bukan sekadar tontonan, melainkan juga sebuah pernyataan: Kebaya adalah simbol keberanian, keindahan, dan ketangguhan perempuan Indonesia.

Gerakan ini juga membawa dampak positif bagi ekonomi kerakyatan. Meningkatnya minat terhadap kebaya secara otomatis mendorong permintaan terhadap kain tradisional dan memicu pertumbuhan para perajin batik, penenun, penjahit, dan pelaku industri kreatif lainnya. Seperti kata Renitasari, kebaya bukan hanya hidup, melainkan juga menghidupi—menjadi mesin penggerak ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi banyak orang.

Sebuah Pernyataan Diri

Gerakan Indonesia Berkebaya kini telah menyebar luas tak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di media sosial. Para figur publik, mulai dari Andien,



Pemeran film pendek *#KitaBerkebaya* dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional tanggal 24 Juli 2025 (Sumber: [instagram.com/andien](https://www.instagram.com/andien))

Yura Yunita, hingga Rania Maheswari Yasmin, kerap terlihat mengenakan kebaya dalam kegiatan sehari-hari mereka. Mereka bukan hanya berbusana, melainkan memberikan pernyataan bahwa mengenakan kebaya adalah bentuk kebanggaan dan ekspresi diri yang autentik.

Pada akhirnya, gerakan ini mengajak kita semua untuk melihat kebaya tidak hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari identitas masa kini. Ia adalah simbol inklusif yang dapat dikenakan oleh siapa saja dari berbagai usia, latar belakang, dan gaya hidup. Dengan mengenakan kebaya, perempuan Indonesia tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang aktif, energik, dan berani tampil beda di tengah arus modernitas.

Kebaya telah melampaui fungsinya sebagai busana. Ia adalah cerita yang tak pernah usai tentang perjuangan, keindahan, dan ketangguhan perempuan Indonesia. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kebaya akan terus hidup dan menghidupi. Kebaya menjadi bagian dari napas yang membuat Indonesia tetap berakar pada budayanya sambil melangkah maju ke masa depan.

Bagaimana dengan Anda? Kapan terakhir Anda mengenakan kebaya? ■

Daftar Subjek

Bebas Visa Kunjungan (BVK)



Malaysia



Myanmar



Laos



Hong Kong



Brunei Darussalam



Thailand



Vietnam



Suriname



Singapura



Timor Leste



Kamboja



Kolombia



Turki



Brasil



Warga negara asing pemegang *permanent resident* Singapura yang melalui tempat pemeriksaan imigrasi tertentu



Level Up through Education in Indonesia

This Visa Is Your First Step

Studying in Indonesia means cultural, historical, and academic immersion. Indonesia is a living classroom where every island, every tradition, and every community offers a unique story and learning opportunity. While not top ranked globally, Indonesia offers what many others don't: cultural immersion, local friendliness, affordable living, and cross disciplinary experiences.



Know the Types of E30 Series Education Visas



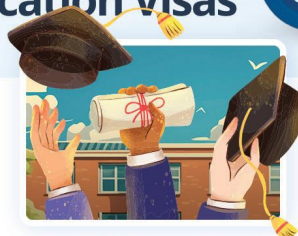
E30

For **Courses** and
Non-Formal Educations

For language or skill courses.
Examples: Indonesian language courses,
coding, culinary arts, design,
and vocational certifications

 Fee
IDR 6-8.5 million

 Validity
1-2 years



E30A & E30B

For **Formal Education**

Visa E30A is intended for foreign students enrolling in primary and secondary education (equivalent to elementary to high school). Visa E30B is for foreigners pursuing higher education, from diploma to doctoral programs.

 Fee
IDR 6-12 million depending on duration

 Validity
Up to 4 years

How to Apply for Education Visas

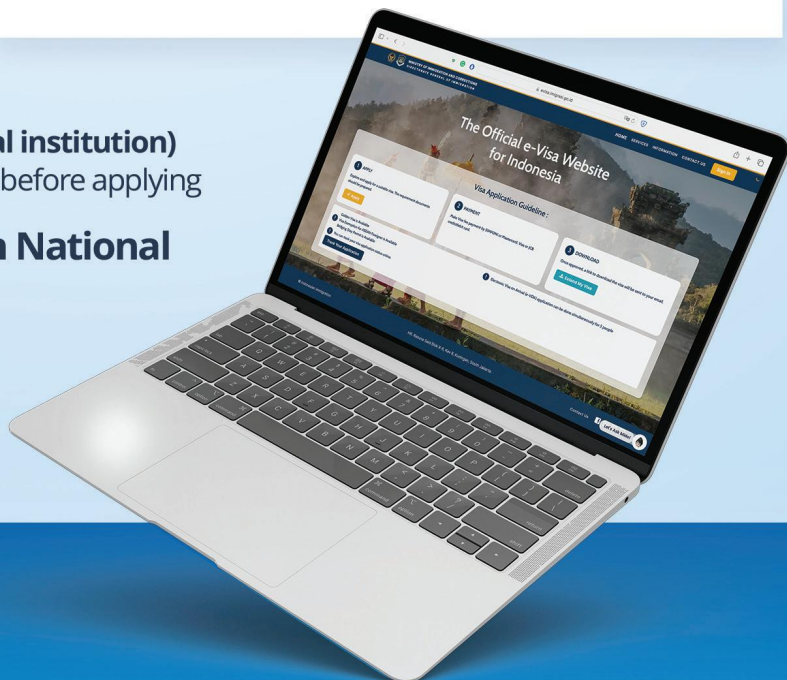
- You need a **sponsor (individual or educational institution)**
- The sponsor must **create an account at evisa** before applying

Required Documents for the Foreign National

1. Passport valid for at least 6 months
2. Recent color photo
3. CV and travel itinerary
4. Letter of Acceptance from the institution
5. Sponsorship letter

Ready to Study in Indonesia?

Apply for an education visa online through evisa.imigrasi.go.id and start your journey!



Forum Internasional DGICM 2025:

DESA BINAAN IMIGRASI JADI INSPIRASI

Forum DGICM ke-28 menjadi ajang bagi Indonesia menunjukkan aksi nyata di bidang keimigrasian. Delegasi Indonesia memaparkan berbagai inisiatif dan capaian dalam memerangi penyelundupan manusia.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Indonesia menegaskan perannya dalam memimpin upaya pencegahan penyelundupan manusia di kawasan ASEAN.

Komitmen ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif pada The 28th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of Foreign Affairs Meeting (DGICM) dan pertemuan terkait yang berlangsung

pada Selasa (12/8) ini diadakan di The Rizqun International Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman memimpin langsung delegasi Indonesia yang terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Bandar Seri Begawan, bersama seluruh kepala imigrasi negara anggota

ASEAN, Timor Leste, dan Sekretariat ASEAN. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia memaparkan keberhasilan mengungkap rute penyelundupan manusia melalui kerja sama efektif antara aparat penegak hukum nasional dan internasional. Keberhasilan ini menjadi salah satu *best practice* yang diharapkan dapat direplikasi di negara anggota lainnya.

Sejarah DGICM

Pembentukan Pertemuan Direktur Jenderal Departemen Imigrasi dan Kepala Divisi Urusan Konsuler Kementerian Luar Negeri (DGICM) berawal dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarnegara anggota ASEAN di bidang imigrasi dan konsuler.

Tonggak sejarah terbentuknya DGICM ditandai oleh Pertemuan Kepala Negara Anggota Imigrasi ASEAN (Jakarta Note) yang diadakan di Jakarta pada 15 Agustus 1996. Dalam pertemuan ini, para kepala negara menyepakati pentingnya kerja sama yang erat dan memutuskan untuk mengadakan pertemuan tahunan. Keputusan ini menjadi landasan bagi pembentukan platform yang saat ini dikenal sebagai DGICM.

Jajaran direktur jenderal imigrasi se-ASEAN dalam forum DGICM ke-28 di Brunei Darussalam (Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)





Plt. Direktur Jenderal Imigrasi saat hadir di forum DGICM ke-28 di Brunei Darussalam
(Foto: Dok. Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi)

Menyorot Desa Binaan Imigrasi

Di forum intelijen keimigrasian ini, Indonesia memaparkan inisiatif Desa Binaan Imigrasi sebagai langkah preventif untuk mengedukasi masyarakat sekaligus mencegah praktik penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang. Langkah ini mendapat perhatian positif dari peserta karena memadukan pendekatan teknologi dengan pemberdayaan masyarakat.

“Kami menyadari bahwa manajemen migrasi bukan lagi sekadar tentang kontrol fisik, melainkan juga membangun kepercayaan, berbagi informasi, dan bergerak maju bersama,” ujar Yuldi.

Lebih lanjut, Yuldi menjelaskan bahwa mayoritas korban perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM) berasal dari desa-desa terpencil dengan akses informasi yang terbatas.

Pemahaman di masyarakat mengenai prosedur imigrasi dan paspor, hak dan kewajiban sebagai calon pekerja migran, serta risiko migrasi nonprosedural tidak memadai. Kerentanan inilah yang dieksploitasi oleh sindikat perdagangan dan penyelundupan manusia.

Menampilkan Inovasi

Dalam konsultasi dengan Australia, diskusi berfokus pada upaya kolektif melawan kejahatan transnasional, mencakup keamanan siber, peningkatan kapasitas, dan manajemen perbatasan

yang adaptif terhadap risiko digital. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia proaktif dalam mencari solusi bersama untuk menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang.

Selain kepemimpinan dalam kolaborasi, Indonesia juga mempresentasikan berbagai inovasi teknologi yang menjadi pilar utama modernisasi Ditjen Imigrasi. Dalam forum DGICM ke-28 ini, delegasi Indonesia memperkenalkan platform e-visa untuk layanan izin tinggal, *helpdesk* berbasis kecerdasan buatan, serta aplikasi All Indonesia yang siap diluncurkan. Sejumlah inovasi ini dirancang untuk mendukung koordinasi antarlembaga dan meningkatkan efisiensi layanan.

Salah satu implementasi teknologi yang paling signifikan adalah penggunaan *autogate* di bandara dan pelabuhan utama. Langkah strategis ini telah membuahkan hasil positif. Lebih dari 60% penumpang kini menggunakan *autogate*. Angka ini tidak hanya mencerminkan pergeseran dari praktik tradisional, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem otomatisasi yang efisien dan aman.

Komitmen Indonesia

Pertemuan hari pertama DGICM 2025 menggarisbawahi komitmen bersama seluruh negara anggota ASEAN dan Timor Leste untuk memperkuat

kerja sama lintas batas, memerangi penyelundupan manusia, dan meningkatkan keamanan kawasan.

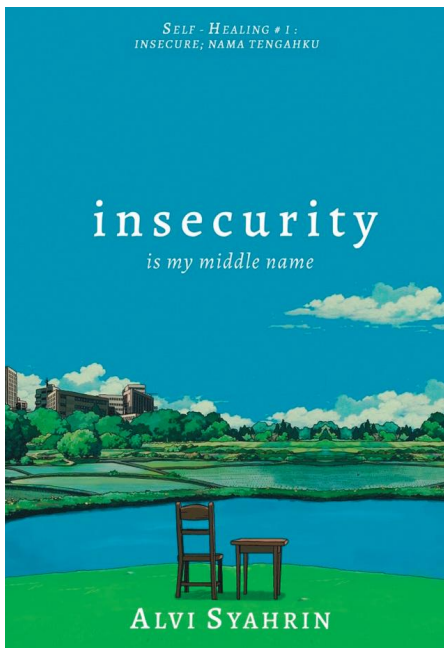
Indonesia berkomitmen penuh untuk memberantas penyelundupan manusia, sebuah kejahatan transnasional yang mengancam keamanan nasional, merusak integritas perbatasan, dan mengeksploitasi individu yang rentan. Imigrasi Indonesia juga akan terus memperkuat upaya nasional melalui kombinasi penegakan hukum strategis, perlindungan korban, dan kerja sama internasional.

“Kami mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban. Dalam setiap kasus yang melibatkan migran ilegal, kami meng-*assess* status mereka untuk mengidentifikasi apakah mereka adalah korban perdagangan atau penyelundupan manusia,” papar Yuldi.

Untuk memperkuat pendekatan ini, Indonesia telah mengembangkan mekanisme rujukan nasional dan formulir penyaringan investigasi untuk mengidentifikasi korban dan pelaku. Tindakan administratif, seperti deportasi dan larangan masuk, akan diterapkan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keimigrasian, sambil terus mengumpulkan informasi untuk mengungkap jaringan penyelundupan yang lebih luas.

Indonesia telah mengimplementasikan berbagai praktik terbaik, termasuk deteksi dini melalui peningkatan pertukaran informasi dengan mitra internasional, penggunaan alat pemantauan digital untuk mengidentifikasi perekrutan daring, serta peningkatan kehadiran unit intelijen dan penegakan hukum Imigrasi di setiap pintu masuk dan keluar utama. Meskipun demikian, tantangan masih terus berkembang, terutama dengan maraknya penggunaan platform digital dan saluran komunikasi terdesentralisasi oleh jaringan penyelundupan. Oleh karena itu, Imigrasi Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas dalam pemantauan siber, integrasi data, dan pertukaran informasi di tingkat regional.

Menutup pernyataannya, Yuldi menegaskan, “Indonesia mendorong kerja sama yang lebih erat di kawasan, baik melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, maupun pemanfaatan teknologi mutakhir. Kami percaya, dengan kolaborasi yang solid, kawasan ASEAN dapat menjadi lebih aman dan tangguh dalam menghadapi tantangan keimigrasian.” ■



Judul Buku : *Insecurity is My Middle Name*
 Penulis : Alvi Syahrin
 Penerbit : Alvi Ardhi Publishing
 Tahun Terbit : Juli 2023 (cetakan ke-15)
 Halaman : 264 halaman

INSECURITY IS MY MIDDLE NAME:

Saat Perasaan Negatif Jadi Katalis Perubahan

Pada era ketika kesempurnaan dipuja, penulis *Insecurity is My Middle Name* justru mengajak pembaca untuk merangkul ketidaksempurnaan. Buku ini bukan sekadar panduan, melainkan cermin untuk melihat *insecurity* dari sudut yang memberdayakan.

■ Penulis: Fipit Fatimah

Insecurity is My Middle Name merupakan buku karya penulis *best seller* Indonesia saat ini, Alvi Syahrin. Buku ini termasuk dalam kategori *self-improvement*. *Insecurity* merupakan buku pertama dari seri *self-improvement* karya penulis. Selain itu, penulis juga menghasilkan karya seri *Jika Kita*.

Alvi Syahrin menyapa pembaca di bagian awal buku ini seolah-olah sebagai *insecurity* itu sendiri. Pembaca seperti diajak berdialog dalam mengalami setiap halaman, misalnya dengan kalimat, "Hai, ini aku, *your insecurity*. Lewat buku ini, kita coba jadi teman, yuk?"

Buku ini terdiri atas 45 bab yang pembahasannya dibagi menjadi 5 bagian. Kelima bagian tersebut, yaitu *Insecurity I*: fisik yang kurang menarik; *Insecurity II*: masa depan yang buram; *Insecurity III*: jauh tertinggal dari teman-temanku; *Insecurity IV*: *I hate myself*; dan *Insecurity V*: berdamai dengan *insecurity*.

Penulis menjelaskan bahwa *insecurity* itu tidak selalu negatif. *Insecurity* bisa menjadi pendorong terjadinya perubahan dan perbaikan diri seseorang, tetapi dengan cara

yang kurang menyenangkan. Dominasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari telah menciptakan standar-standar tertentu dalam fase hidup seseorang. Misalnya, ketika seseorang belum memenuhi "standar yang umum" di usia tertentu, hal itu dapat memicu rasa *insecurity*.

Alvi Syahrin mengajak pembaca melihat *insecurity* dengan perspektif yang berbeda. Melalui kalimat-kalimat berbentuk dialog, pembaca diajak menempatkan *insecurity* sesuai proporsinya, kemudian mencari solusi atas *insecurity* tersebut.

Salah satu contoh dialog tersebut adalah "Kenapa, sih, kamu terlalu membebani dirimu? Seakan-akan, kamu harus memiliki segalanya di usia 20-an ini. *You're just twenty, you'll still have your 30s or 40s or who-knows-the-future*. Kalau kamu sudah mendapatkan semua di usia 20 tahunan, bisakah itu menjamin kehidupan aman dan tenteram di usia tuamu? Belum tentu. Jangan pernah lupa kata 'jatuh' dan 'bangkrut'. Sukses di usia muda juga punya risiko. Sukses di usia 20 tahun, belum tentu sukses juga di usia 30 tahun, 40 tahun, dan seterusnya."

(+) Kelebihan Buku

Buku ini cocok dan relevan untuk pembaca yang sedang mengalami *insecurity*. Sebab, penulis menawarkan perspektif baru dan membantu pembaca menerima *insecurity*-nya secara perlahan.

Bahasa yang digunakan penulis sederhana sehingga mudah dipahami, tetapi tetap kaya akan motivasi. Terdapat penekanan pada bagian penting ketika poin-poin kunci dicetak dengan format berbeda. Hal ini memudahkan pembaca mememukannya. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan ilustrasi pendukung pada setiap babnya.

(-) Kekurangan Buku

Nuansa konten buku ini cukup religius. Nasihat dan motivasi di akhir bab sering kali berbasis keyakinan penulis. Bagi pembaca dengan latar belakang berbeda, hal ini mungkin mengurangi kesan *self-improvement* yang universal.

Buku terbaru koleksi Perpustakaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi ini dapat membantu pembaca memberdayakan *insecurity* menjadi perubahan positif. Meski memiliki kelebihan dan kekurangan, buku ini sangat direkomendasikan bagi yang ingin memahami dan mengembangkan hal positif dalam diri sendiri.

Tertarik membaca? Kunjungi Perpustakaan Ditjen Imigrasi atau hubungi pustakawan/pengelolanya! ■



Upacara 17 Agustus 2025 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Izra Mahendra (Foto: Alfiqri Anshari)



Petugas imigrasi melayani permintaan informasi paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Apel pembukaan pelatihan penjaga deteni di Bandung (Foto: Dimas Zainuddin S.)



Pembagian bingkisan makanan kepada warga sekitar kantor Direktorat Jenderal Imigrasi yang dilaksanakan tiap dua pekan sekali (Foto: Ketut Adi Wardana)



Donor darah sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI (Foto: Putu Maha Permana)



Drumben dari Politeknik Imigrasi yang membawakan lagu-lagu nasional pada upacara 17 Agustus 2025 (Foto: Aditja Pratama Gegana Uwen)



Pengambilan foto paspor pemohon anak-anak saat Paspor Merdeka Kibar di Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Foto: Arif Rahman Suryaman)

PETUGAS IMIGRASI SEKARANG PAKAI *BODYCAM*, LO!



Buat apa petugas imigrasi pakai *bodycam* segala, sih?

Ya, kerja yang bener aja. Gitu aja masyarakat udah seneng, kok!

Lo, menurutku karena Imigrasi mau makin baik, makanya petugas imigrasi mulai difasilitasi *bodycam*.

Nggak usah gaya-gayaan juga, kali, pakai *bodycam* segala!

Bukan buat gaya-gayaan, Jooo. Imigrasi itu bagian dari penegakan hukum.

Bodycam udah lama diadopsi oleh negara-negara maju, kayak Inggris, Kanada, sama Amerika, sebagai bagian dari Digital Evidence Management System.

Bodycam malah menunjukkan kalau Imigrasi siap transparan.

OOPS!

Karena apa? Semua ada bukti digitalnya, yang diambil dari *bodycam* itu. Makanya kalau mau julid, riset dulu.

Oh, gitu, ya, Wo.

?!
?

Berarti Imigrasi sekarang keren banget, ya?

Iya, dong! Imigrasi bermartabat, Indonesia berdaulat.

Layanan Urus Paspor Kolektif

di Kantor, Kampus, Komunitas, atau Kompleks Perumahan Kamu

Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor imigrasi terdekat



**KAMU
DI SITU AJA,
BIAR KAMI YANG
DATANG
KE SANA!**



Masuk Indonesia Kini Lebih Mudah dengan **All Indonesia**

All Indonesia

Satu aplikasi untuk Imigrasi,
Bea Cukai, Kesehatan,
dan Karantina

Praktis, cepat, dan nyaman.
Isi deklarasi sekali saja
lewat *web* atau *mobile*.

allindonesia.imigrasi.go.id

